

DATA BASE

DATA DAN FAKTA PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL BUDAYA KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2016

Tim Penyusun :

Ir. H. Iskandar D, M.Ec.Dev
Ikram Mubarak, S.STP, M.AP
Alfiansyah, S.STP
Aminuddin, ST.MT
Helmi Al Atas, ST
Hendra Irawan, ST
Nelly Fadlia, SP
Agus Subandi, S. AP
Abdul Gafur, S. AP
Amrullah.

Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa
Jalan Garuda No. 1 Sumbawa Besar, Telp. 0371-21582 Fax. 0371-23657
email : sosbud.bappedasbw@yahoo.com

Daftar Isi

Lembar Sampul

Tim Penyusun	i
Daftar Isi	ii
Kata Pengantar	iv
Pendahuluan	v

Bab 1 Gambaran Umum 1

2.1. Geografi	1
2.3. Demografi	2

Bab 2 Data dan Analisis

Pembangunan Bidang Sosial Budaya	5
2.1. Pendidikan	5
2.2. Kesehatan	12
2.3. Arsip dan Perpustakaan	19
a. Arsip	19
b. Perputakaan	19
2.4. Kependudukan dan Catatan Sipil	20
2.5. Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	22
2.6. Sosial	25
2.7. Tenaga Kerja	27
2.8. Transmigrasi	30
2.9. Kebudayaan	31
2.10. Pemuda dan Olah Raga	33

2.11. Kesatuan Bangsa dan Politik	
Dalam Negeri dan Sat.Pol-PP	34
a. Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri	34
b. Sat. Pol - PP	36
2.12. Pemerintahan Umum	37
2.13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	42
 Bab 3 Penutup	 44

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulisan buku "***Data Base " Data dan Fakta Pembangunan Bidang Sosial Budaya Kabupaten Sumbawa Tahun 2016***" dapat diselesaikan.

Penyusunan buku ini dimaksudkan untuk memberikan informasi secara komprehensif tentang kondisi pembangunan Bidang Sosial Budaya dan berbagai permasalahan yang dihadapi. Perencanaan merupakan elemen penting dalam proses pembangunan. Perencanaan yang baik akan lebih memberikan peluang untuk terlaksananya sebuah pembangunan dengan hasil yang baik pula. Bahan baku utama sebuah perencanaan adalah ketersediaan data dan informasi yang akurat, muktahir dan konfhrensip, oleh karenanya penyajian data dan informasi yang baik menjadi penentu kualitas perencanaan.

Data yang disajikan dalam buku "***Data Base " Data dan Fakta Pembangunan Bidang Sosial Budaya Kabupaten Sumbawa Tahun 2016***" ini bersumber dari badan / Dinas / Instansi di Kabupaten Sumbawa, dengan maksud menjadi bahan masukan dan acuan untuk melakukan perencanaan yang lebih baik pada tahun yang akan datang, pembuatan kebijakan serta pengambilan keputusan dan mengevaluasi hasil pembangunan secara berkesinambungan. Data dan fakta serta analisis yang tersaji merupakan gambaran keadaan pada tahun 2016.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa buku "***Data Base " Data dan Fakta Pembangunan Bidang Sosial Budaya Kabupaten Sumbawa Tahun 2016***" masih memiliki kekurangan, oleh karena itu masukan dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan dalam rangka penyempurnaan agar buku ini akan lebih memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumbawa Besar, 2017
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SUMBAWA,

Ir. H. Iskandar D. M.Ec.Dev
NIP. 19620515 200003 1 002

Pendahuluan

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, karena data dan informasi memegang peran yang sangat strategis dalam penguatan perencanaan dan evaluasi pembangunan.

Salah satu sarana informasi penyelenggaraan pemerintah daerah adalah berupa buku data base, yang memuat gambaran wilayah Kabupaten Sumbawa dari kondisi sosial budaya yang diantaranya adalah berkaitan dengan masalah pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, keluarga berencana dan kondisi pemerintahan yang dapat menjadi acuan dasar perencanaan pembangunan daerah, sekaligus sarana publikasi hasil-hasil penyelenggaraan pembangunan dan potensi yang masih dapat dikembangkan di Kabupaten Sumbawa.

Visi dan Misi Kabupaten Sumbawa 2016-2021



Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sumbawa berpedoman pada Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 - 2021 dengan visi yaitu :

~ v ~

***"Terwujudnya Masyarakat Sumbawa Yang Berdaya Saing,
Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Semangat
Gotong Royong".***

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Berdaya Saing

Berdaya Saing adalah kondisi yang menjadi syarat terwujudnya kedaulatan suatu bangsa sesuai dengan semangat Tri Sakti yang menjadi rujukan utama penyusunan visi dan misi pembangunan nasional. Masyarakat berdaya saing di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumbawa 2011-2016 diartikan sebagai Kemampuan pengelolaan sumberdaya daerah secara bermutu, ekonomis, efektif dan efisien, sehingga lebih unggul dari daerah lainnya. Berdaya saing juga mengandung makna kemampuan untuk berprestasi dalam bidang kerja masing-masing, dengan kualifikasi atau kualitas tertentu, sehingga dapat sejajar atau bahkan lebih tinggi dengan daerah lain.

2. Mandiri

Artinya masyarakat Kabupaten Sumbawa yang mampu memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi, sosial dan berkeadilan. Di samping itu, mandiri juga diartikan sebagai kondisi dimana Pemerintah Daerah mampu mengelola potensi sumberdaya alam dan meningkatkan pendapatan daerah yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

3. Berkepribadian

Artinya masyarakat Kabupaten Sumbawa benar-benar memahami dan melaksanakan prinsip hidup (*parenti*) *Tau Samawa* yakni *takit ke nene kangila boat lenge*. Prinsip hidup ini ditandai dengan terwujudnya masyarakat yang religius, patuh kepada hukum dan penuh toleransi terhadap keberagaman

Sebagai pencerminan dari upaya menjalankan fungsi dan peran daerah dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sumbawa, dijabarkan kedalam tujuh misi pembangunan daerah, sebagai berikut:

MISI 1 MENINGKATKAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA MELALUI
PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN PENINGKATAN DERAJAT
KESEHATAN MASYARAKAT.

Misi ini menekankan pada pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditandai dengan membaiknya taraf pendidikan dan derajat kesehatan penduduk, yang didukung oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik, sosial dasar bagi masyarakat serta mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta berdaya saing untuk mencapai kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera.

Aspek pendidikan dan kesehatan merupakan aspek dasar yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Pendidikan dan kesehatan yang diselenggarakan adalah yang berkeadilan dan merata, dalam arti semua warga masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan yang layak, terjangkau dan berkualitas.

MISI 2 MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG BERSIH, HANDAL DAN PROFESIONAL
SEHINGGA MAMPU MENJALANKAN PEMERINTAHAN SESUAI DENGAN
PRINSIP TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE).

Dimainkan sebagai misi yang di emban untuk mengupayakan pengelolaan pemerintahan yang baik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, terbentuknya birokrasi pemerintahan yang profesional dan berkinerja tinggi serta meningkatnya pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Misi ini menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan yang tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, dan terbentuknya birokrasi pemerintahan yang professional dan berkinerja tinggi, menjamin kepastian hukum, melindungi segenap masyarakat serta

memberikan akses dan kesempatan bagi penduduk agar memperoleh manfaat dari pembangunan yang adil dan merata.

Inti dari misi ini adalah berlangsungnya pelayanan publik yang dapat diartikan sebagai pemberian layanan oleh instansi, lembaga atau organisasi yang memberikan layanan kepada publik atau masyarakat sebagai pelanggan, dengan memperhatikan aturan atau prosedur yang ditetapkan serta memenuhi standar minimal layanannya, guna menciptakan kepuasan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk dapat memberikan pelayanan publik yang prima dan memuaskan masyarakat diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik. Penerapan prinsip *good governance* dan *clean government* diharapkan mampu memberikan dan meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat.

MISI 3 MEWUJUDKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DENGAN MEMBANGUN SINERGI YANG KUAT DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI.

Dimaknai sebagai misi yang diemban sebagai upaya meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar dan wilayah untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat, memacu peningkatan perekonomian daerah dan mengurangi disparitas pembangunan antar kecamatan/desa/kelurahan serta mengoptimalkan penataan ruang pembangunan wilayah yang partisipatif dan berkelanjutan.

Misi ini dihayatkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan umum yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum untuk menunjang produktifitas dan mobilitas publik. Sangat diyakini bahwa upaya pemenuhan pelayanan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat serta pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan akan berjalan dengan baik jika didukung oleh infrastruktur yang memadai. Ketersediaan sarana dan prasarana wilayah yang memadai merupakan hal penting yang harus diupayakan oleh pemerintah daerah. Pembangunan infrastruktur yang memadai di segala bidang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing daerah.

Untuk mewujudkan semua harapan besar tersebut, pemerintah daerah akan berupaya semaksimal mungkin untuk membangun sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

MISI 4 MENGEMBANGKAN POTENSI UNGGULAN DAERAH DAN
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS USAHA MASYARAKAT DEMI
TERWUJUDNYA KESEJAHTARAAN MASYARAKAT, PENURUNAN ANGKA
KEMISKINAN DAN PERLUASAN LAPANGAN KERJA.

Dimaknai sebagai misi yang diemban untuk meningkatkan perekonomian daerah dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya daerah secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, menciptakan iklim investasi yang kondusif serta meningkatkan ekonomi kerakyatan.

Semangat dari misi ini adalah mengembangkan perekonomian daerah yang berlandaskan ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah, yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal berbasis agribisnis dan agroindustri sehingga mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Misi ini juga dihajatkan untuk memperkuat perekonomian daerah berbasis keunggulan wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, industri pengolahan, dan pelayanan masyarakat; mengedepankan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan iptek,; serta mewujudkan daerah yang maju dalam berinvestasi.

MISI 5 MEWUJUDKAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN
HIDUP YANG BERKELANJUTAN.

Misi ini mengemban amanat untuk melaksanakan pembangunan yang memanfaatkan ekonomi Sumberdaya Alam dengan tetap menjaga keseimbangan antara pemanfaatan serta keberlanjutan SDA dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan.

Prinsip dari pembangunan berkelanjutan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dengan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang tersedia tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.

Kondisi masyarakat Kabupaten Sumbawa memiliki pengertian dan kepedulian yang tinggi terhadap keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan yang didasari oleh kesadaran akan fungsi strategis lingkungan terhadap keberlangsungan hidup manusia. Daya dukung dan kualitas lingkungan, harus menjadi acuan utama segala aktivitas pembangunan, agar tercipta tatanan kehidupan yang seimbang, nyaman dan berkelanjutan.

MISI 6 MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG RELIGIUS DAN MEMELIHARA TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA.

Dimaknai sebagai misi yang diemban dalam menciptakan kondisi masyarakat yang memiliki nilai-nilai, norma, semangat dan kaidah agama, khususnya Islam yang diyakini dan dianut serta menjadi karakter dan identitas mayoritas Kabupaten Sumbawa, yang harus menjiwai, mewarnai dan menjadi ruh atau pedoman bagi seluruh aktivitas kehidupan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, dengan tetap menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan hidup beragama.

MISI 7 MEMELIHARA DAN MENGEMBANGKAN POTENSI BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL.

Misi ini mengemban amanat untuk menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kokoh dan berbudaya yang bercirikan tingginya pemanfaatan modal sosial dalam pembangunan, meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olah raga, terpeliharanya seni dan warisan budaya dan industri pariwisata yang berdaya saing dalam bingkai kearifan lokal.

Kondisi masyarakat Kabupaten Sumbawa yang memiliki nilai-nilai budaya yang baik, melekat dan menjadi jati diri, yang harus

terus tumbuh dan berkembang seiring dengan laju pembangunan, serta menjadi perekat bagi keselarasan dan kestabilan sosial. Pengembangan budaya tersebut dilakukan dengan tetap menghargai pluralitas kehidupan masyarakat secara proporsional.

BAB 1

Gambaran Umum

Aspek geografi dan demografi merupakan salah satu aspek kondisi kewilayahan yang mutlak diperhatikan sebagai ruang dan subyek pembangunan. Dari uraian ini diharapkan dapat terpetakan potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Sumbawa lima tahun kedepan.

1.1. Geografis

Kabupaten Sumbawa adalah salah satu wilayah kabupaten dari sepuluh kabupaten / kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Secara geografis Kabupaten Sumbawa terletak diantara 116° 42' – 118° 22' Bujur Timur dan 8° 8' – 9° 7' Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Dompu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa Barat;

Secara rata – rata jarak jangkauan Ibu Kota Kecamatan terhadap ibu Kota Kabupaten Sumbawa adalah 45,00 Km, dengan jarak Kota Kecamatan terjauh dari Ibu Kota Kabupaten adalah 103,00 Km yaitu Kecamatan Tarano. Sedangkan jarak jangkauan ibu kota desa terhadap ibu kota kecamatan secara rata – rata adalah 10,16 Km dengan sebaran bahwa rata – rata jarak terjauh dari ibu kota desa terhadap ibu kota kecamatan adalah 58,11 Km.

Kabupaten Sumbawa dengan luas wilayah 11.556,44 km², terdiri dari wilayah daratan 6.643,98 km², dan wilayah perairan laut 4.912,46 km². Dengan luasan tersebut menjadikan Kabupaten Sumbawa memiliki potensi sumberdaya alam cukup besar dengan posisi geostrategis pada jalur lalu lintas perdagangan dan berada pada koridor lima Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang berorientasi pada pembangunan pariwisata dan Ketahanan Pangan Nasional.

Secara administratif Kabupaten Sumbawa terbagi dalam 24 kecamatan, 157 Desa dan 8 Kelurahan, dengan rincian pada sebagai dibawah ini :

Tabel 1.1
Wilayah Administratif Pemerintahan Kab. Sumbawa

No.	Kecamatan	Luas Daratan (Km2)	Desa / Kelurahan	Persentase Daratan
1.	Lunyuk	513.74	7	7.73
2.	Orong Telu	465.97	4	7.01
3.	Alas	123.04	8	2.64
4.	Alas Barat	168.88	8	1.16
5.	Buer	137.01	6	2.66
6.	Utan	155.42	9	2.8
7.	Rhee	230.82	4	3.01
8.	Batulanteh	391.4	6	5.89
9.	Sumbawa	44.83	8	0.66
10.	Labuhan Badas	435.89	7	6.69
11.	Unter Iwes	82.38	8	1.13
12.	Moyohilir	186.79	10	2.81
13.	Moyo Utara	90.8	6	1.37
14.	Moyohulu	311.96	12	4.7
15.	Ropang	444.48	5	6.69
16.	Lenangguar	504.32	4	7.59
17.	Lantung	167.45	4	2.52
18.	Lape	204.43	4	3.07
19.	Lopok	155.59	7	2.34
20.	Plampang	418.69	11	7.11
21.	Labangka	243.08	5	2.52
22.	Maronge	274.75	4	4.46
23.	Empang	558.55	10	8.41
24.	Tarano	333.71	8	5.02
Jumlah		6,643.98	165	100

Sumber Data : BPS Kab. Sumbawa

Topografi Kabupaten Sumbawa didominasi perbukitan dengan ketinggian berkisar antara 0 sampai 1.730 m diatas permukaan laut (dpl). Ketinggian 0-100 m dpl mencapai luas 26,51%; 100-500 m dpl seluas 42,31%; 500-1.000 m dpl seluas 27,69% dan > 1.000 m dpl seluas 3,49%, sementara untuk ketinggian

kota-kota kecamatan berkisar antara 10 meter sampai 650 m dpl. Ibu Kota Kecamatan Batulanteh (Semongkat) merupakan ibu kota kecamatan yang tertinggi sedangkan Sumbawa Besar merupakan Ibu Kota Kecamatan yang terendah.

1.2. Demografi

Jumlah penduduk di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2016 sebesar 445,503 jiwa, terdiri dari laki-laki 227,323 jiwa dan perempuan 218,180 jiwa. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Sumbawa

No.	Kecamatan	Luas (Km2)	Penduduk(Jiwa)			Kepadatan (Jiwa / Km2)
			Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Lunyuk	513.74	10,460	9,852	20,312	40
2.	Orong Telu	465.97	2,499	2,274	4,773	10
3.	Alas	123.04	14,753	14,427	29,180	237
4.	Alas Barat	168.88	9,967	9,599	19,566	116
5.	Buer	137.01	7,066	7,044	14,110	103
6.	Utan	155.42	15,174	14,863	30,037	193
7.	Rhee	230.82	3,780	3,481	7,261	31
8.	Batulanteh	391.4	5,426	4,968	10,394	27
9.	Sumbawa	44.83	30,842	30,022	60,864	1358
10.	Lab. Badas	435.89	16,756	16,536	33,292	76
11.	Unter Iwes	82.38	10,039	9,486	19,525	237
12.	Moyohilir	186.79	12,072	11,710	23,782	127
13.	Moyo Utara	90.8	4,912	4,746	9,658	106
14.	Moyohulu	311.96	10,679	10,057	20,736	66
15.	Ropang	444.48	2,708	2,428	5,136	12
16.	Lenangguar	504.32	3,382	3,062	6,444	13
17.	Lantung	167.45	1,454	1,405	2,859	17
18.	Lape	204.43	8,870	8,397	17,267	84
19.	Lopok	155.59	9,464	9,280	18,744	120

20.	Plampang	418.69	16,132	15,337	31,469	75
21	Labangka	243.08	5,566	5,217	10,783	44
22.	Maronge	274.75	5,356	4,954	10,310	38
23.	Empang	558.55	11,597	10,963	22,560	40
24	Tarano	333.71	8,369	8,072	16,441	49
Jumlah		6,643.98	227,323	218,180	445,503	67

Sumber Data : BPS Kab. Sumbawa

Berdasarkan tabel diatas Kecamatan Sumbawa merupakan kecamatan terpadat dibandingkan 23 kecamatan lainnya dengan kepadatan penduduk sebesar 1.358 jiwa/km², sedangkan kecamatan yang terjarang penduduknya adalah Kecamatan Orong Telu dengan kepadatan 10 jiwa/km². Kepadatan penduduk Kabupaten Sumbawa secara keseluruhan adalah 67 jiwa/km². Hal ini menggambarkan Kabupaten Sumbawa termasuk sebagai kabupaten dengan tingkat kepadatan yang rendah.

BAB 2

Data dan Analisis

Pembangunan Bidang Sosial Budaya

Pembangunan bidang sosial dan budaya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, telah dilaksanakan berbagai kebijakan dan program-program pembangunan di bidang sosial dan budaya. Secara garis besar arah kebijakan pembangunan sosial dan budaya adalah sebagai berikut.

2.1. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu aspek paling penting dalam kehidupan kita. Dengan pendidikan kita bisa memajukan taraf hidup dan menjalani kehidupan yang lebih bermartabat. Begitu pentingnya pendidikan dalam kehidupan kita, sehingga di sekeliling kita terdapat banyak sekali orang yang berjuang mati - matian untuk kelangsungan pendidikan.

Pendidikan mempunyai cakupan yang luas. Kemajuan pendidikan suatu wilayah mengacu pada tiga aspek penting yang dikenal dengan tiga pilar strategis yaitu : 1). peningkatan akses pendidikan, 2). Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, dan 3). Peningkatan tata kelola pendidikan.

Peningkatan akses pendidikan menunjuk pada pemerataan pemerataan dan kemudahan untuk mendapatkan pendidikan, sementara peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menunjuk pada peningkatan mutu pendidikan seperti kurikulum yang relevan dengan kebutuhan daerah, kualitas proses pembelajaran, sarana dan prasarana, kualitas kelulusan, kualitas pendidik, dan biaya pendidikan. Tata kelola mencakup peningkatan sistem pengawasan sekolah yang melibatkan pihak penyelenggara pendidikan, kementerian pendidikan nasional di daerah, dan DPRD.

Pencapaian pembangunan pendidikan sangat tergantung dari keadaan suatu wilayah. Kondisi geografis, potensi wilayah yang meliputi sumberdaya alam dan manusia, keadaan ekonomi, social, budaya dan aksesibilitas merupakan faktor – faktor yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi kemajuan sektor pendidikan. Sementara itu perbandingan jumlah anak usia sekolah dengan ketersediaan sarana dan prasarana sekolah, kuantitas dan kualitas guru, kualitas kurikulum dan media pembelajaran, peran aktif orang tua dan penyelenggara pendidikan lain merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pengembangan sektor pendidikan. Faktor tersebut dapat menunjang tetapi bias juga menghambat pencapaian target pembangunan pendidikan jika tidak dimanfaatkan dan dikelola secara baik dan benar.

Oleh sebab itu pembangunan pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh, sistematis dan dinamis dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi.

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sumbawa telah ditempuh diantaranya melalui kegiatan peningkatan layanan akses pendidikan melalui pemerataan pendidikan, baik pendidikan dasar maupun pendidikan menengah sebagai implementasi dari kebijakan inisiasi Wajar 12 tahun, kemudian pengembangan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, hingga pemerataan pendidikan melalui penyelenggaraan pendidikan non formal dalam bentuk kejar paket A, B dan C. Outcome dari penyelenggaraan berbagai urusan wajib bidang pendidikan dapat dilihat dari cakupan jumlah anak usia sekolah yang bersekolah dengan ditunjukkan oleh perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Berikut disajikan APK dan APM masing-masing jenjang pendidikan di Kabupaten Sumbawa.

1. ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK)

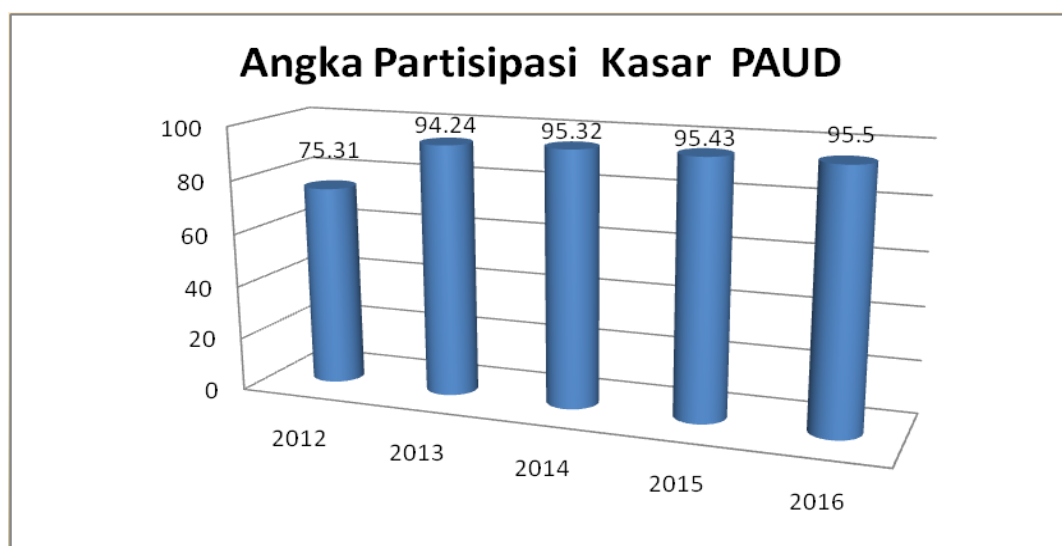
Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhitungkan usia sebagai persentase dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dalam satu tahun ajaran. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan dan merupakan indikator yang

paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Secara umum perkembangan APK pada semua jenjang pendidikan di Kabupaten Sumbawa dari Tahun 2012-2016 disajikan sebagai berikut.

a. ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PAUD/TK/RA.

Indikator APK pendidikan pada jenjang PAUD/TK/RA mengalami peningkatan selama periode 2012-2016, yakni dari 75,31 pada tahun 2012 menjadi 95,55% pada tahun 2016. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan program PAUD di Kabupaten Sumbawa terus mengalami peningkatan ditandai dengan meningkatnya jumlah lembaga-lembaga PAUD baik formal maupun non formal, serta meningkatnya kesadaran orang tua untuk memasukkan anaknya di PAUD terlebih dahulu untuk mendorong tumbuh kembang anak secara optimal dan menyiapkan mereka secara lebih baik sebelum masuk ke jenjang SD/MI.



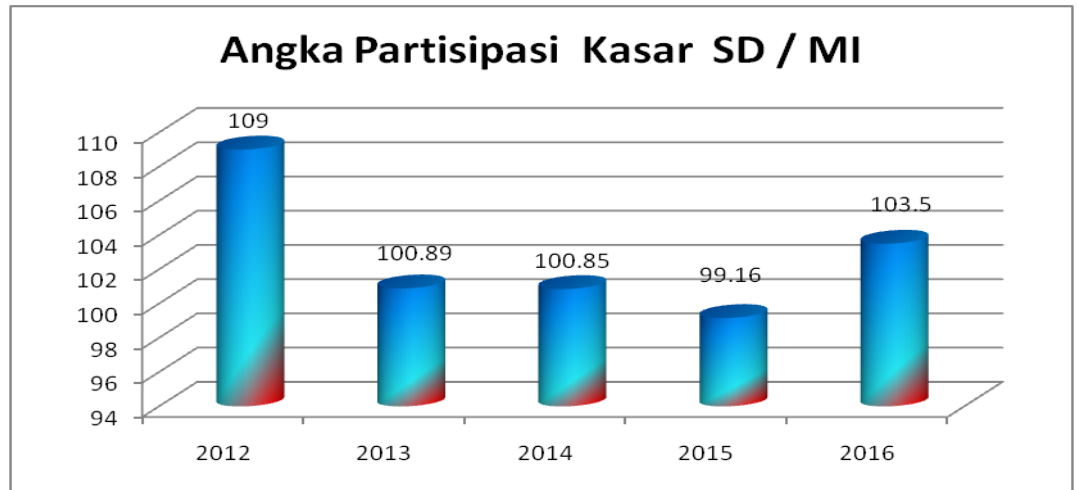
Sumber Data: Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa.

Gambar 2.1. Perkembangan APK Jenjang PAUD

b. ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SD/MI.

Indikator APK pendidikan pada jenjang SD/MI dalam periode 2012-2016 mengalami penurunan, yakni dari 109,00% pada tahun 2012 menjadi 99,16% pada tahun 2016. Penurunan indikator APK menunjukkan adanya peningkatan efisiensi internal

penyelenggaraan pendidikan, dimana idealnya APK sama dengan APM mengarah pada angka 100%.

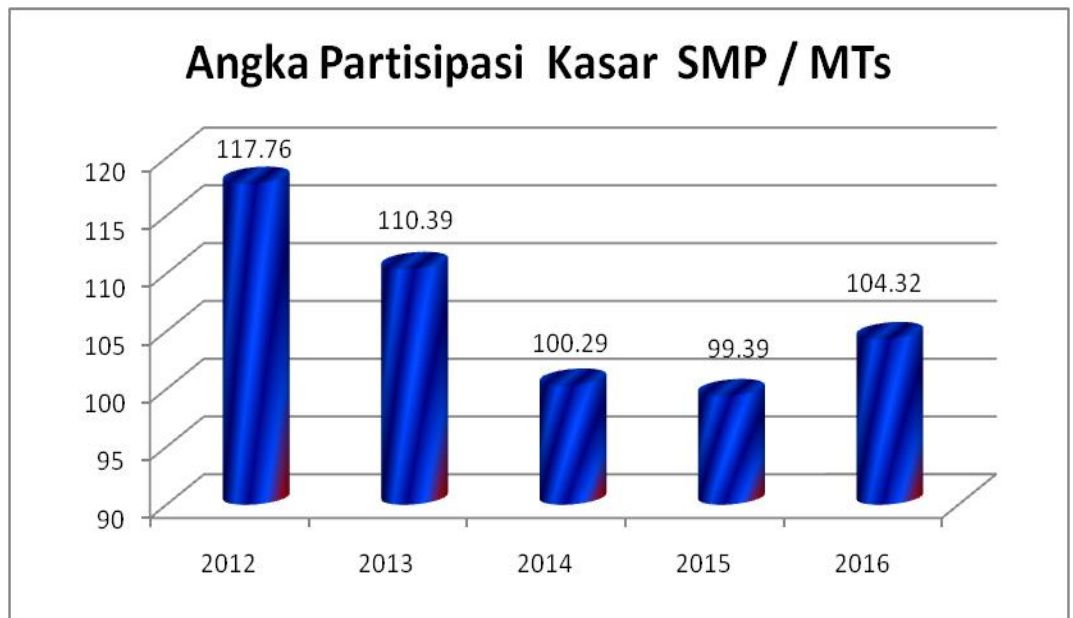


Sumber Data: Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa.

Gambar 2.2. Perkembangan APK SD/MI

c. ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMP/MTs.

Indikator APK pendidikan pada jenjang SMP/MTs selama periode 2012-2016 mengalami peningkatan dari 99,39% pada tahun 2015 menjadi 104,32% pada tahun 2016.



Sumber Data: Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa.

Gambar 2.3. Perkembangan APK SMP/MTs

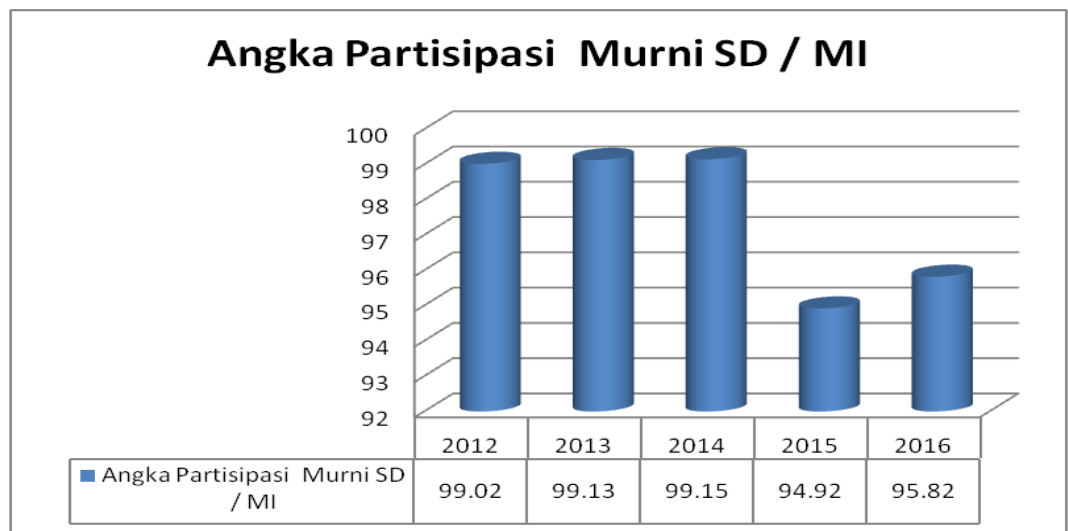
2. ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah jumlah siswa dari kelompok usia resmi untuk jenjang pendidikan tertentu dinyatakan sebagai persentase dari populasi yang sesuai. APM menunjukkan tingkat partisipasi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan tertentu, yang merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Semakin tinggi APM menunjukkan tingginya partisipasi penduduk usia sekolah resmi.

Secara umum perkembangan APM pada semua jenjang pendidikan di Kabupaten Sumbawa dari Tahun 2012-2016 disajikan sebagai berikut.

a. ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SD / MI/ PAKET A.

Indikator APM pendidikan pada jenjang SD/MI/Paket A pada tahun 2016 sebesar 95,82% dari 94,92% pada tahun 2015 atau mengalami peningkatan, akan tetapi dalam rentang tahun 2012-2016 mengalami penurunan Dari 99,02 pada tahun 2012 menjadi 95,82 pada tahun 2016.

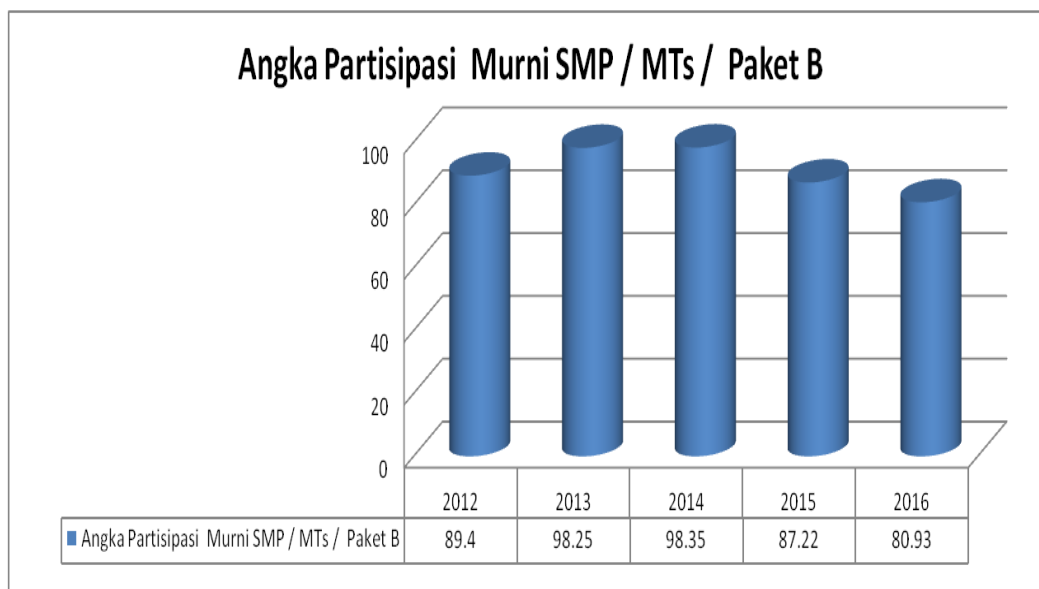


Sumber Data: Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa.

Gambar 2.4. Perkembangan APM SD/MI

b. ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SMP/MTs/PAKET B.

Indikator APM pendidikan pada jenjang SMP/MTs/Paket B pada tahun 2016 sebesar 80,93 % dari 87,22% pada tahun 2015 dan dalam rentang tahun 2012-2016 mengalami penurunan sebagaimana tergambar sebagai berikut.



Sumber Data: Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa.

Gambar 2.5. Perkembangan APM SMP/MTs

Salah satu faktor penentu yang mempengaruhi angka partisipasi sekolah selain kesadaran masyarakat (orang tua dan anak didik), juga akses masyarakat terhadap keberadaan lembaga pendidikan (sekolah) baik pendidikan dasar maupun menengah. Adapun sebaran lembaga pendidikan di Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1

Sebaran Lembaga Pendidikan (Sekolah) di Kab. Sumbawa

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JENJANG PENDIDIKAN			
			TK/ RA	SD/MI	SMP/ MTs	SM/SMK /MA
1	2	3	4	5	6	7
1	Lunyuk	7	14	20	7	3
2	Orong Telu	4	0	11	3	1
3	Alas	8	13	19	10	4
4	Alas Barat	8	9	17	4	2
5	Buer	6	6	12	2	1
6	Utan	9	7	24	7	4
7	Rhee	4	4	7	2	1
8	Batulanteh	6	8	21	6	2
9	Sumbawa	8	24	26	8	12
10	Labuhan Badas	7	11	24	9	4

11	Unter Iwes	8	6	21	6	3
12	Moyo Hilir	10	24	26	7	2
13	Moyo Utara	6	6	12	3	1
14	Moyo Hulu	12	18	24	8	3
15	Ropang	5	4	7	3	1
16	Lenangguar	4	4	10	4	1
17	Lantung	4	2	3	1	0
18	Lape	4	13	15	5	1
19	Lopok	7	15	18	4	1
20	Plampang	11	14	27	12	4
21	Labangka	5	2	7	4	1
22	Maronge	4	7	6	4	1
23	Empang	10	13	21	6	3
24	Tarano	8	5	18	5	1
	Jumlah	165	229	396	130	57

Sumber Data: Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kecamatan yang belum memiliki sekolah menengah atas seperti di Kecamatan Lantung, hal ini disebabkan karena masih minimnya jumlah siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tersebut, sehingga untuk saat ini masih belum menjadi prioritas dalam pembangunannya. sedangkan keberadaan SD/MI, dan SMP/MTs sudah tersedia sesuai kebutuhan di seluruh kecamatan.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka menekan angka putus sekolah pada berbagai jenjang pendidikan adalah melalui penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal (PNFI), di antaranya melalui jalur pendidikan paket A, B dan C.

Berdasarkan tingkat kelulusan siswa pada ujian nasional di Kabupaten Sumbawa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terlihat bahwa pada jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2012 mencapai 100%, dan capaian ini tetap terjaga sampai 2016. Pada pendidikan jenjang SMP/MTs tingkat kelulusannya dari tahun 2012 menunjukkan kualitas yang terjaga pada kisaran 99%. Selengkapnya perkembangan tingkat kelulusan sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.2.
Tingkat Kelulusan Siswa Pada Ujian Nasional
di Kabupaten Sumbawa

NO	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI					
	jumlah siswa	8.321	8.714	7.908	8.369	8.773
	lulus	8.321	8.714	7.908	8.369	8.773
	tidak lulus	0	0	0	0	0
2	SMP/MTs					
	jumlah siswa	6.972	7.638	2.908	7.319	7.488
	Lulus	6.948	7.638	2.908	7.319	7.484
	tidak lulus	24	0	0	0	4

2.2. Kesehatan

Tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi baik masyarakat, swasta maupun pemerintah. Tercapainya pembangunan kesehatan merupakan cerminan masyarakat, yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat serta memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa sebagaiupaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Arah kebijakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Sumbawa dilaksanakan melalui upaya penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, peningkatan status gizi masyarakat serta menurunkan angka kesakitan penyakit menular seperti TBC, DBD, HIV dan AIDS serta Malaria. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah

Kabupaten Sumbawa telah melaksanakan berbagai upaya antara lain melalui revitalisasi dan perkuatan layanan 25 puskesmas di 24 kecamatan. 23 puskesmas dari 25 puskesmas merupakan puskesmas perawatan atau dapat melayani rawat inap, sementara 2 puskesmas non perawatan (non rawat inap) terdapat di Puskesmas Seketeng dan Puskesmas Batu Lanteh. Dalam rangka memperkuat layanan kesehatan yang fokusnya pada upaya promotif dan preventif, puskesmas didukung oleh jejaring yang terdiri dari 81 polindes, dan 93 Puskesmas Pembantu.

Kondisi derajat kesehatan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 dapat dilihat dari indikator angka kematian, angka kesakitan dan angka status gizi masyarakat. Kejadian kematian atau Mortalitas yang terjadi pada kurun waktu dan tempat tertentu yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, dapat berupa penyakit maupun sebab lainnya

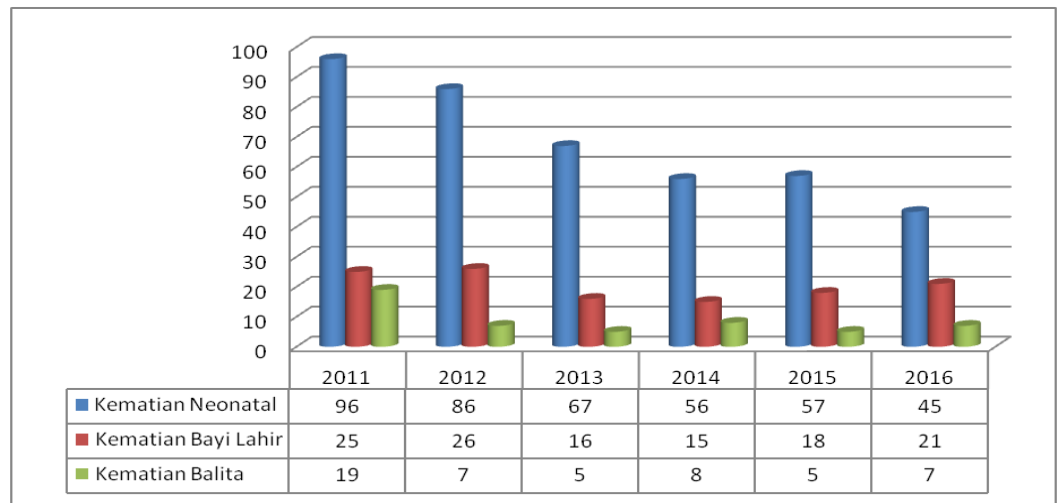
1. ANGKA KEMATIAN BAYI DAN BALITA(AKB DAN AKABA)

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun, yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Bayi lahir hidup pada Tahun 2016 sebanyak 8.995 terdapat 71 kasus kematian atau per 1000 kelahiran yang dilaporkan.

Angka kematian bayi (AKB) pada Tahun 2016 di Kabupaten Sumbawa adalah sebanyak 66 kasus termasuk neonatus sebanyak 45 kasus dan bayi sebanyak 21 kasus yang disebabkan beberapa indikator kematian seperti BBLR, Asfiksia, Sepsis, Kelainan kongenital dan lain-lain penyebab kematian.

Angka kematian balita (AKABA) adalah jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 Tahun yang dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. Jumlah kematian anak balita pada Tahun 2016 sebanyak 7 kasus dimana jika dibandingkan dengan Tahun 2015 sebanyak 5 kasus, jumlahnya mengalami kenaikan.

Angka kematian balita menggambarkan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti tingkat kesejahteraan sosial dalam arti luas tingkat kemiskinan penduduk, akses pelayanan kesehatan, pendidikan masyarakat.



Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa

Gambar 2.5. Angka Kematian Neonatal, Bayi dan Balita

Untuk mempertajam penurunan kasus kematian pada balita ini diperlukan peningkatan akses balita terhadap sanitasi, air bersih dan penanganan segera terhadap gejala penyakit.

Tingkat mortalitas penduduk di Kabupaten Sumbawa dari waktu ke waktu dapat memberi gambaran perkembangan derajat kesehatan penduduk atau sebagai salah satu indikator dalam penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan. Kematian bayi berkaitan dengan kondisi ibu saat prahamil, hamil penolong persalinan dan perawatan bayi baru lahir, sedangkan kematian anak balitaberkaitan dengan keadaan gizi, pola pengasuhan oleh orangtuanya dan adanya penyakit penyerta.

Tabel 2.3.

Penyebab Kematian Neonatus, Bayi dan Balita

NO	INDIKATOR MORTALITAS/KEMATIAN	2016
1	Kematian Neonatus (0-28hr)	
	- BBLR	20
	- Asfiksia	13
	- Tetanus Noenatorum	0
	- sepsis	2
	- Kel Kongenital	1
	- Lain-Lain	9
	Jumlah I:	45
2	Kematian Bayi (29 hari - 11 bulan)	
	- Pneumonia/ISPA	8
	- Diare/Disentri	4

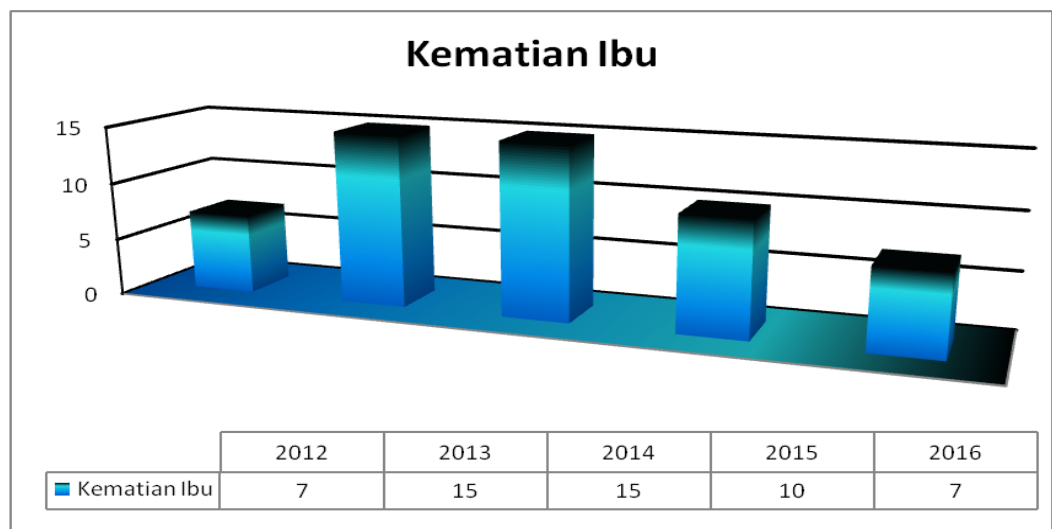
	- Malaria	1
	- Lain – lain	8
	Jumlah II:	21
3	Kematian Anak Balita (12 - 59 bulan)	
	- Diare	3
	- Gizi Buruk	1
	- Lain – lain	3
	Jumlah III:	7

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa

2. ANGKA KEMATIAN IBU (AKI)

Angka kematian ibu adalah jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan sebagai angka per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan kematian ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau penanganannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan dan terjatuh.

Selama Tahun 2016 terjadi 7 kasus kematian ibudengan perincian 0 (nol) kasus kematian saat hamil, 2 (dua)kasus kematian saat bersalin dan 5 (lima) kasus kematian saat nifas. Kejadian kematian ibu dan perkembangannya dalam 5 tahun terakhir digambarkan sebagai berikut :



Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa

Gambar 2.6. Trend Kematian Ibu di Kabupaten Sumbawa

Dari gambar diatas angka kematian 5 tahun terakhir menunjukan keadaan yang fluktuatif dimana jumlah kasus kematian tertinggi terjadi pada tahun 2013 dan tahun 2014 sedangkan terendah pada tahun 2012 dan tahun 2016. Adapun penyebab kasus kematian ibu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4.
Penyebab Kasus Kematiaan Ibu

No	Penyebab Kematian Ibu	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Abortus	0	0	0	0	0
2	Perdarahan	0	5	10	3	2
3	Infeksi Jalan Lahir	2	2	0	1	1
4	Eklamsia/Pre Eklamsia	2	6	1	3	1
5	Pertus Lama	0	0	0	0	0
6	Emboli	0	0	2	0	3
7	Lain-lain	3	2	2	3	0
TOTAL		7	15	15	10	7

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa

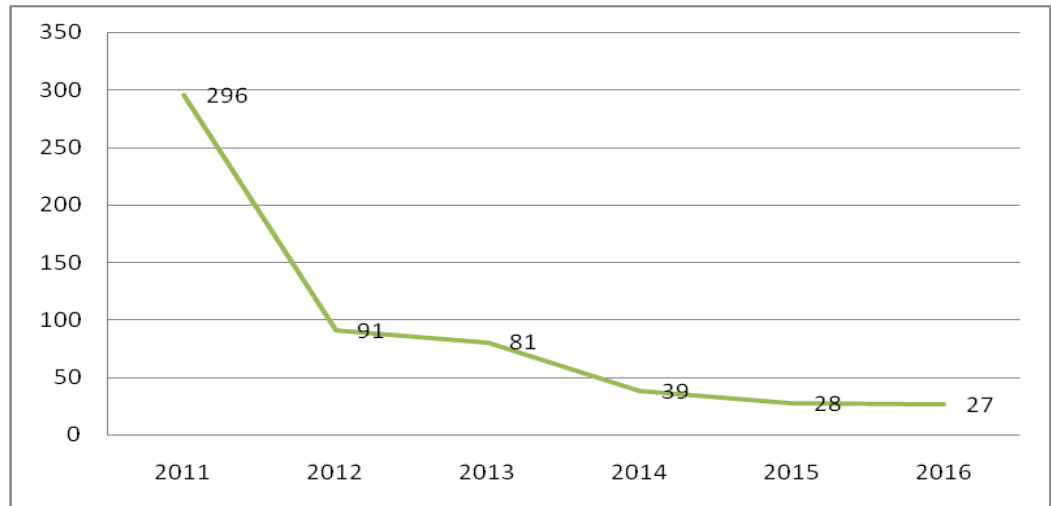
Upaya kesehatan ibu dan anak antara lain dilakukan melalui peningkatan pelayanan antenatal sesuai standar bagi seluruh ibu hamil di semua fasilitas kesehatan dan peningkatan target pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, peran serta masyarakat secara aktif melalui pembentukan kelompok peduli ibu hamil / bersalin, kelompok ibu menjigguah tapan ru, penu akti pendonorang bersalin dan k partisipasi aktif lainnya.

3. STATUS GIZI

Status gizi masyarakat biasanya digambarkan oleh masalah gizi yang dialami oleh golongan penduduk yang rawan gizi terutama balita. Status gizi balita juga dapat menjadi salah satu indikator untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat. Status gizi merupakan hasil akumulasi dari jumlah asupan makanan dan kebutuhan tubuh. Jika keseimbangan ini terganggu, maka akan terjadi gangguan pada pertumbuhan tubuh. Gangguan ini tercermin hasil pengukuran berat

badan (*BB*) atau tinggi badan (*TB*) dibandingkan usia dari penduduk tersebut.

Kasus gizi buruk selama tahun 2016 ditemukan kasus baru sebanyak 27 kasus. Jumlah tersebut menyebar di beberapa puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Sumbawa.



Sumber : Seksi Gizi Bidang Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa

Gambar 2.7. Trend Kematian Ibu di Kabupaten Sumbawa

Dari gambar grafik diatas terlihat bahwa kasus gizi buruk masih fluktuatif tetapi cenderung menurun, hal ini terjadi karena sistem survailans saat ini sudah mulai berjalan dengan baik.

Dari sebanyak 27 kasus gizi buruk yang ditemukan selama tahun 2016 semuanya mendapat penanganan dengan baik di puskesmas maupun rumah sakit. Jumlah kasus kematian gizi buruk tahun 2016 sebanyak 1 kasus sama dengan Tahun 2015 sebanyak 1 kasus, ini jauh menurun jika dibandingkan dengan kematian gizi buruk tahun 2014 sebanyak 7 kasus dengan jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan sebanyak 39 kasus, sedangkan tahun 2013 jumlah kasus gizi buruk sebanyak 81 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 5 (*lima*) kasus, pada tahun 2016 jumlah kasus menurun baik kasus gizi buruk maupun kematian.

Kematian pada kasus gizi buruk disebabkan karena adanya penyakit bawaan / penyakit penyerta yaitu hidrocephalus, tumor abdomen dengan limfadenitis tuberculosis, ISPA, pneumoni dan diare.

Perbaikan gizi masyarakat di Kabupaten Sumbawa diarahkan untuk mendukung percepatan pencapaian target RPJMD yaitu penurunan prevalensi gizi buruk melalui kegiatan pendidikan gizi masyarakat, penanggulangan kurang gizi baik gizi makro maupun gizi mikro, surveilans gizi dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Untuk menjaga agar bayi terhindar dari masalah gizi, maka pemberian makanan pada bayi terutama usia 0 – 6 bulan diberikan dalam bentuk ASI saja. Setelah bayi berusia lebih dari 6 bulan, ASI tetap diberikan dan ditambah dengan MP-ASI yang bergizi sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembangnya

4. MORBIDITAS (ANGKA KESAKITAN)

Penyakit yang paling banyak diderita oleh masyarakat yang berkunjung ke puskesmas adalah infeksi akut lain pada saluran pernapasan bagian atas sebanyak 25.992 penderita. Kondisi ini erat kaitannya dengan tingkat kekebalan seseorang terhadap penyakit dan keadaan kesehatan lingkungan masyarakat. Kasus penyakit terbanyak di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2016 berdasarkan laporan puskesmas dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5.
10 Penyakit Terbanyak di Kabupaten Sumbawa

NO.	JENIS PENYAKIT	JUMLAH PENDERITA
1.	Infeksi Akut Lain pada Saluran Pernapasan Bag. Atas	25.992
2.	Penyakit pada sitem otot & jaringan pengikat (peny. Tulang belulang, radang sendi termasuk reumatik)	13.493
3.	Penyakit lain pada Saluran pernapasan bag. Atas	11.131
4.	Diare (termasuk tersangka kolera)	10.420
5.	Penyakit Kulit Alergi	8.958
6.	Penyakit Tekanan Darah Tinggi	7.511
7.	Penyakit Kulit Infeksi	6.577
8.	Kecelakaan dan Ruda Paksa	6.002
9.	Penyakit Pulpa dan Jaringan Periapikal	3.598
10.	Asma	2.545
J U M L A H		97.877

Sumber : Dinas Kesehatan Kab.Sumbawa

2.3. Arsip dan Perpustakaan Daerah

1. ARSIP

Arsip adalah data terekam yang seakan-akan tidak mempunyai arti ketika ia disimpan ditempatnya, karena arsip tidak lebih dari sekumpulan kata, rekaman suara atau gambar yang ditata sedemikian rupa. Arsip akan mempunyai kekuatan ketika orang mulai mencari dan memakainya untuk tujuan tertentu.

Dalam rangka meningkatkan mutu SDM pengelolaan kearsipan, Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumbawa telah mengadakan kegiatan peningkatan SDM pengelolaan kearsipan antara lain Pengembangan dan peningkatan angka kredit arsiparis, dan sampai tahun 2016 terdapat 80 orang pengelola arsip terpadu terlatih.

2. PERPUSTAKAAN

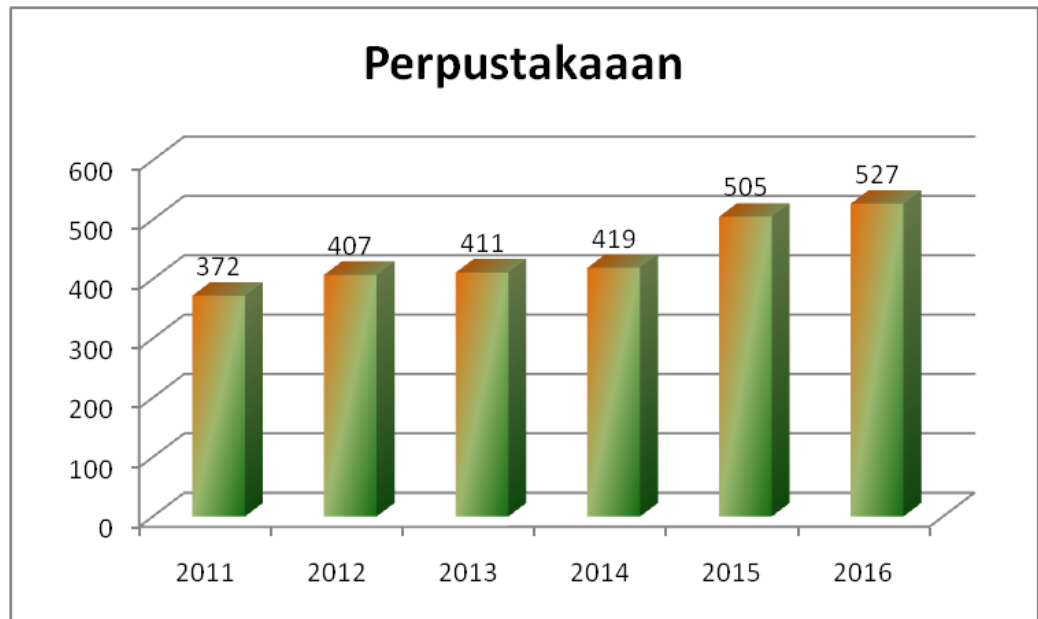
Untuk mencapai cakupan layanan perpustakaan daerah ditempuh melalui peningkatan jumlah koleksi buku dan melakukan pembinaan kepada perpustakaan di kecamatan dan beberapa kegiatan yaitu pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang rajin belajar, yang diimplementasikan melalui pelayanan perpustakaan umum dan perpustakaan keliling

Ketersediaan perpustakaan yang tersebar di Kabupaten Sumbawa dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, hal ini ditandai dengan bertambahnya perpustakaan, bertambahnya jumlah perpustakaan sebanyak 22 buah yakni dari 505 perpustakaan pada tahun 2015 menjadi 527 perpustakaan pada tahun 2016, Peningkatan perpustakaan ini seiring dengan dengan meningkatnya jumlah pengunjung, hal ini merupakan salah satu indikator meningkatnya budaya baca masyarakat.

Meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan tersebut menunjukkan ekspektasi positif bagi upaya peningkatan minat baca masyarakat, sehingga pemerintah Kabupaten Sumbawa terus berupaya meningkatkan jumlah koleksi buku di perpustakaan. Hal ini terlihat dari jumlah penambahan koleksi buku dari 38.998 eksemplar pada tahun 2015 menjadi 40.748 eksemplar di tahun 2016.

Untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar, maka pengembangan minat dan budaya baca terus dilaksanakan antara lain melalui kegiatan lomba pidato dan lomba bercerita yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun.

Berikut perkembangan perpustakaan dikabupaten Sumbawa sebagaimana tergambar sebagai berikut :



Gambar 2.8. Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Sumbawa

Perpustakaan yang terorganisasi secara baik dan sistematis, akan memberikan kemudahan bagi proses belajar masyarakat baik di sekolah maupun di luar sekolah tempat perpustakaan tersebut berada. Dengan kata lain kemajuan bidang pendidikan dan dengan adanya perbaikan metode belajar-mengajar yang dirasakan tidak bisa dipisahkan dari masalah penyediaan fasilitas dan sarana pendidikan termasuk perpustakaan.

2.4. Kependudukan dan Catatan Sipil

Data kependudukan memegang peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam menentukan suatu kebijakan. Pencatatan dan evaluasi hasil pembangunan baik bagi pemerintahan maupun swasta dan masyarakat. Oleh karena itu ketersediaan data kependudukan

disemua tingkat administrasi pemerintahan menjadi instrumen kunci keberhasilan program - program pembangunan.

Pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten yang telah diimplementasikan secara operasional melalui Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Adapun pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berupa biodata penduduk, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Pindah/datang serta dokumen catatan sipil lainnya seperti akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengakuan anak.

Berdasarkan data administrasi kependudukan di Kabupaten Sumbawa terdata jumlah KTP yang telah diterbitkan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yakni dari 226.965 KTP yang diterbitkan pada tahun 2015 menjadi 266.283 KTP yang diterbitkan pada tahun 2016. Penerbitan akta perkawinan mengalami peningkatan dari 128 akta perkawinan pada tahun 2015 menjadi 146 akta perkawinan pada tahun 2016. Berbeda dengan akte perkawinan yang menurun, akta kelahiran yang diterbitkan meningkat dari tahun 2015 ke tahun 2016 yaitu dari 16.547 akte menjadi 17.473, hal ini menunjukkan peningkatan kinerja pencatatan kelahiran dan juga kesadaran masyarakat untuk melengkapi dokumen administrasi kependudukan.

Tabel 2.6.
Perkembangan Administrasi Kependudukan
di Kabupaten Sumbawa

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
KTP yang diterbitkan	219.739	224.968	235.87	226.956	266.283
Akta perkawinan yang dikeluarkan	209	81	119	128	146
Akta Kelahiran yang dikeluarkan	8.568	3.292	16.202	16.547	17.473
Akta Kematian yang dikeluarkan	35	35	33	60	160
Akta Perceraian yang dikeluarkan	4	1	2	13	10

Kepemilikan dokumen kependudukan yang sah, merupakan salah satu prasyarat administrasi penduduk untuk mendapatkan layanan publik sehingga pemerintahpun berkepentingan untuk mendorong pemenuhan kepemilikan dokumen dimaksud.

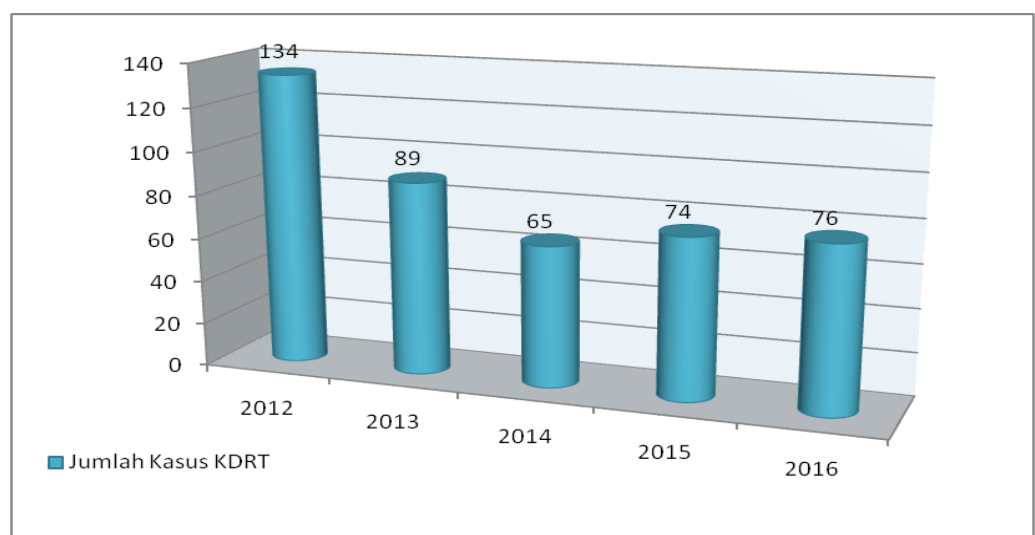
2.5. Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan untuk mengupayakan dan mengkondisikan situasi serta proses kehidupan yang kondusif dalam mewujudkan kepekaan terhadap terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Terkait dengan penanganan terhadap kasus-kasus yang terjadi sampai dengan tahun 2016 menunjukkan kecenderungan penurunan dari 134 kasus pada tahun 2012 menjadi 76 pada tahun 2016 meski untuk 3 tahun terakhir penurunan yang terjadi relatif tidak lagi signifikan, justru terjadi peningkatan kasus meski tidak cukup signifikan apabila dibandingkan dengan jumlah penambahan rumah tangga.

Terkait dengan kasus-kasus yang terjadi tersebut telah ditangani melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A).

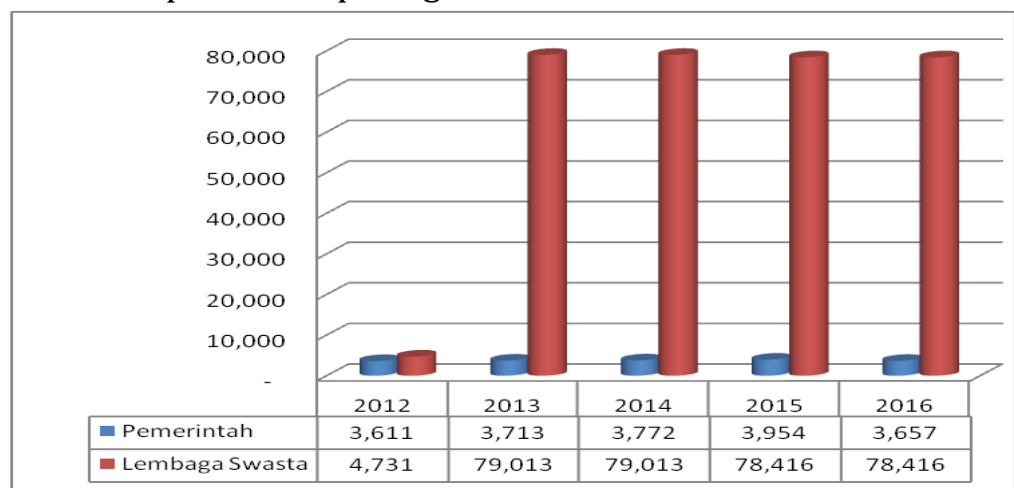


Gambar 2.9. Jumlah Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Sumbawa

Urusan wajib pemberdayaan perempuan di Kabupaten Sumbawa juga dihayatkan dalam rangka memajukan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan, termasuk pembangunan politik dan pembangunan masyarakat baik melalui pemerintahan maupun kegiatan sosial lainnya. Terkait hal tersebut, terus diupayakan peningkatan kegiatan, seperti pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang dilatarbelakangi untuk memperkuat jaringan Gerakan Sayang Ibu (GSI) yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas Kecamatan Sayang Ibu dengan sasaran kegiatan adalah Satgas GSI Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan desa serta ibu hamil, ibu menyusui, kader posyandu, bayi, balita dan anak.

Kegiatan lainnya berupa penyuluhan bagi ibu-ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera, karena diharapkan peran dan posisi strategis perempuan sebagai ibu rumah tangga guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ibu-ibu pada khususnya dan kaum perempuan pada umumnya tentang peran dan potensi perempuan dalam membangun desa untuk mewujudkan keluarga sejahtera lahir dan batin.

Gambaran pemberdayaan perempuan di Kabupaten Sumbawa dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 2.10. Jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah dan Swasta di Kabupaten Sumbawa

Dari gambar diatas proporsi perempuan dalam birokrasi pemerintahan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dari 3.954 orang pada tahun 2015 menjadi 3.657

orang pada tahun 2016, dengan pekerja di lembaga swasta tetap sejumlah 78.416 orang.

Terkait pemenuhan hak anak, Pemerintah Daerah setiap tahunnya selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan anak antara lain melalui penyaluran pendapat anak dalam bentuk aspirasi, pandangan dan rekomendasi anak dengan mengidentifikasi permasalahan, merencanakan kegiatan hingga melakukan kemampuan dalam mengambil keputusan dan membangun kerjasama dengan pihak lain atau orang dewasa. Secara kontinyu setiap tahunnya selalu dilaksanakan Temu Anak Samawa dengan sasaran anak dari usia 7 - 17 tahun, dan dari pertemuan tersebut terpilih perwakilan anak yang dikirim ke Mataram, selanjutnya anak-anak tersebut mewakili Provinsi NTB untuk mengikuti Forum Anak Nasional di Istana Bogor yang difasilitasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Peningkatan kesejahteraan keluarga sebagai basis masyarakat melalui program Keluarga Berencana merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Sumbawa. Keluarga Berencana (KB) adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran.

Berdasarkan hasil pendataan Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan dengan PUS tahun sebelumnya, PUS pada tahun 2015 sebanyak 88.357 PUS sedangkan pada tahun 2016 sejumlah 87.830 PUS. Perkembangan jumlah PUS pertahunnya selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana tergambar sebagai berikut :

Tabel 2.6.
Perkembangan Kepesertaan Keluarga Berencana

Tahun	Jumlah PUS	Peserta KB AKTIF	Peserta KB Baru
2012	89,229	64,037	30,298
2013	90,282	67,151	22,597
2014	93,001	70,085	19,664
2015	88,357	68,414	15,421
2016	87,830	68,762	14,514

2.6. Sosial

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka membangun ketahanan sosial yang mampu memberikan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, selaras, bertahap, berkelanjutan dan merata di seluruh Kabupaten Sumbawa.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial dasar bagi masyarakat yang mengalami masalah sosial, rentan dan miskin, telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan seperti pelatihan keterampilan berusaha bagi wanita rawan sosial ekonomi, bimbingan sosial bagi masyarakat yang berada di lokasi Komunitas Adat Terpencil (KAT), untuk memperkuat kelembagaan kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah memberikan subsidi kepada panti sosial. Selain itu bimbingan manajemen usaha bagi anggota Karang Taruna, serta dilaksanakannya pelatihan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).

Untuk jaminan sosial kegiatan berupa penyaluran bantuan bagi sasaran Program Keluarga Harapan Sumbawa. Selain itu telah dilaksanakan pemberian bantuan modal UEP bagi korban tindak kekerasan Migran dan penyaluran bantuan premi untuk Asuransi Kesehatan Sosial (Aksesos) bagi masyarakat miskin pekerja non formal.

Penyaluran bantuan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Bantuan ini diharapkan agar kelompok usaha bersama tersebut dapat berkembang, guna memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatnya kualitas hidup keluarga.

Pelaksanaan program kegiatan tidak hanya dilakukan terhadap masyarakat sebagaimana termasuk dalam kelompok diatas. Pembinaan juga dilaksanakan terhadap kelompok masyarakat baik secara perorangan maupun kelembagaan yang memiliki upaya keterlibatan dalam peningkatan sosial ekonomi masyarakat. Sebagai gambarannya, Kabupaten Sumbawa secara rutin melakukan pembinaan terhadap Karang Taruna. Lembaga kepemudaan ini secara tidak langsung ikut mempengaruhi dinas

sosial Kabupaten Sumbawa terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan yang dilaksanakan

Adapun penduduk yang dikelompokkan sebagai penduduk rawan sosial (PMKS) di Kabupaten Sumbawa sampai dengan tahun 2016 adalah:

Tabel 2.7.

Jumlah PMKS dan yang sudah Tertangani di Kab. Sumbawa

No	Jenis PMKS	Satuan	PMKS 2016	Tertangani Th. 2016	Yang Mendapat Bantuan Th. 2016
1	Anak Balita Terlantar Jiwa)	Jiwa	385	-	-
2	Anak Terlantar (Jiwa)	Jiwa	3,297	135	30
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Jiwa	5	5	-
4	Anak Jalanan (Jiwa)	Jiwa	1	1	-
5	Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	Jiwa	97	33	33
6	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah	Jiwa	10	10	-
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	Jiwa	146	-	-
8	Lanjut Usia Terlantar	Jiwa	4,960	104	104
9	Penyandang Disabilitas	Jiwa	2,459	252	222
10	Tuna Susila	Jiwa	-	-	-
11	Gelandangan (Jiwa)	Jiwa	-	-	-
12	Pengemis	Jiwa	4	4	4
13	Pemulung	Jiwa	12	-	-
14	Kelompok Minoritas	KK	-	-	-
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakatan (BWLBP)	Jiwa	118	25	20
16	Orang dengan HIV/AIDS	Jiwa	46	-	-
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	Jiwa	11	4	-
18	Korban Trafficking	Jiwa	3	3	-
19	Korban Tindak Kekerasan	Jiwa	30	65	40
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	Jiwa	131	10	10
21	Korban Bencana Alam	KK	2,472	2,472	2,472
22	Korban Bencana Sosial	KK	468	468	468
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Jiwa	-	-	-
24	Fakir Miskin	KK	183,936	154,724	154,724
25	Keluarga Bermasalah Psikologis	KK	-	17	-
26	Komunitas Adat Terpencil	KK	425	89	89
	JUMLAH		199,016	158,421	158,216

Berdasarkan tabel di atas maka terlihat bahwa korban bencana alam dan bencana sosial mendapat penanganan seluruhnya

atau 100%, termasuk juga korban tindak kekerasan/trafficking. Penanganan yang masih rendah adalah terhadap LANSIA hanya sebesar 2,10% yaitu 104 jiwa tertangani dari 4.960 lansia. Demikian juga penyandang disabilitas yang hanya tertangani 10,25% (252 dari 2459)

2.7. Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, yaitu usia 15-65 tahun. Berdasarkan UU No 13. tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja. Baik yang sudah bekerja maupun belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan, penduduk yang sudah memasuki usia kerja adalah berusia minimal 15 tahun sampai 65 tahun. Akan tetapi tidak semua penduduk yang memasuki usia kerja termasuk angkatan kerja, Sebab penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi tidak termasuk dalam kelompok angkatan kerja misalnya ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa dan sebagainya.

Penangan masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Sumbawa antara lain dilaksanakan melalui Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja. Program ini ditujukan untuk meningkatkan keterampilan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja dan produktifitas, baik melalui pendidikan formal, pelatihan kerja dan pengembangan di tempat kerja sebagai satu kesatuan sistem pengembangan SDM yang komprehensif dan terpadu. Hal ini memiliki peranan yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kerja dalam mengantisipasi perubahan teknologi dan persyaratan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga pemerintah daerah terus melakukan peningkatan terhadap pelatihan-pelatihan yang bersifat kejuruan guna meningkatkan produktivitas, daya saing yang selanjutnya akan menuju pada penciptaan lapangan kerja baru.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa setiap tahunnya melaksanakan peningkatan terhadap mobilitas kerja melalui

penyebarluasan informasi pasar kerja lewat media-media cetak maupun elektronik dan penerbitan buletin pasar kerja yang terdistribusi sampai ke desa-desa dengan harapan untuk memberikan arah, tujuan sekaligus informasi lowongan kerja serta penempatan tenaga kerja sehingga pencari kerja mendapat gambaran tentang pekerjaan yang diinginkan.

Tabel 2.8.
Angkatan Kerja dan Pengangguran

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Penduduk Usia Kerja	3603	5796	5567	3472	308,043
Penduduk Yang Bekerja	2622	1739	5042	3272	209,615
Pengangguran	4294	2750	525	300	9,361
Total Angkatan Kerja	6916	4489	5567	3472	218,976
Bukan Angkatan Kerja	1672	1011	4517	2872	89,067
TPAK (%)	19.1	12.9	23.9	10.9	71.08
TPT (%)	13.7	33.3	17.3	14.1	4.27

Sumber Data: Disnakertrans Kab. Sumbawa.

Tabel di atas menunjukkan peningkatan signifikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menjadi 71,08% baik dibandingkan dengan tahun 2012 (19,1%) maupun tahun 2015 (10,9%) dan pada saat bersamaan terjadi penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka.

Pada tahun 2016 tercatat pendaftar pencari kerja sejumlah 3.113 orang dan berhasil mendapat penempatan kerja sejumlah 2.647 orang atau 85% sedangkan 15% sisanya belum mendapat penempatan kerja. Berdasarkan penempatan, maka yang mendapat penempatan 100% adalah pendaftar tenaga kerja ke luar negeri yaitu sejumlah 2.374 orang. Penempatan yang rendah adalah pendaftar untuk dalam negeri yang hanya sebesar 273 orang dari 739 pendaftar.

Kasus ketenagakerjaan khususnya pekerja luar negeri menunjukkan pengurangan yang cukup signifikan yaitu dari 156 kasus (2015) menjadi 38 kasus pada tahun 2016, namun catatan diberikan terhadap masih rendahnya prosentase penyelesaian kasus yang terjadi yaitu hanya 4 dari 38 atau 10% pada tahun 2016.

Dibandingkan tahun 2015 maka diperoleh gambaran bahwa jumlah pencari kerja yang mendaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengalami penurunan yaitu dari 3.772 orang menjadi 3.113 orang di tahun 2016 atau menurun sebesar 17,47%. Kecenderungan penurunan ini melanjutkan kecenderungan periode sebelumnya dari 2014 ke 2015 yang juga menurun sebesar 32,24%.

Peningkatan koordinasi terhadap pelayanan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja terus dilaksanakan antara lain melalui pembinaan dibidang hubungan industrial yaitu penyuluhan tata cara penyelesaian kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta kegiatan revitalisasi lembaga kerjasama bipartit di perusahaan. Untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja ditekankan pada pemberian hak-hak dasar tenaga kerja baik perlindungan di bidang sosial ekonomi, perlindungan norma umum serta norma keselamatan dan kesehatan kerja. Demikian juga dengan kegiatan-kegiatan pengawasan dan keselamatan kerja, pengaturan pengupahan, jaminan sosial, perluasan perjanjian kerja bersama dan pembinaan lembaga-lembaga ketenagakerjaan terus dilanjutkan dan tingkatkan dari tahun ke tahun. Penyuluhan dan perlunya perlindungan tenaga kerja, untuk itu ditempuh melalui kebijakan-kebijakan yang terus disempurnakan setiap tahunnya.

Pengaturan pengupahan bagi tenaga kerja merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan, hal ini dimaksudkan agar upah terendah dapat sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Hal ini terus diusahakan agar upah dalam jabatan yang sama tidak jauh berbeda dan terdapat keseimbangan antar wilayah, keseimbangan antara upah tertinggi dan terendah dalam satu sektor atau perusahaan. Besaran UMK ini masih berada dibawah rata-rata kebutuhan hidup minimum, namun menunjukkan kecenderungan terjadinya pengurangan kesenjangan dari tahun ke tahun sebagaimana tergambar sebagai berikut.

Terhadap kebijakan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja yang ditujukan kepada perlindungan tenaga kerja, maka usaha peningkatan pengawasan dari tahun 2011-2015 terlihat seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.9.
Kegiatan Inspeksi Kontrol Dan Kunjungan

NO	KEGIATAN	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Inspeksi	75	115	87	75	75
2.	Kontrol	275	280	150	100	100
3.	Pemeriksaan kasus kecelakaan kerja	8	9	3	15	15
4.	Pemeriksaan kasus PHK	18	12	19	-	19
5.	Pemeriksaan kasus jam kerja		2	-	-	-

Sumber Data: Disnakertrans Kab. Sumbawa.

2.8. Transmigrasi

Penyelenggaraan urusan ketransmigrasian di Kabupaten Sumbawa selain bersumber dari APBD juga berasal dari APBN Tugas pembantuan yang pelaksanaannya diarahkan untuk Pembangunan dan Pengembangan Sarana di Kawasan Transmigrasi, Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi berupa pengembangan luasan lahan usaha produktif di kawasan transmigrasi seluas 1 Ha serta pengadaan saprotan yang diserahkan kepada masyarakat, Pengembangan Sosial Budaya, berupa layanan sosial budaya di satuan pemukiman 1 SP seperti operasional layanan pendidikan, operasional layanan kesehatan. Selain itu dilakukan pembinaan seni budaya seperti pembentukan dan pengembangan seni budaya, pembinaan mental spiritual, pembinaan mental spiritual serta pengadaan sarana ibadah. Kegiatan lain berupa penguatan dan pengembangan lembaga desa dan lembaga masyarakat.

Terkait perkembangan UPT dan Transmigrasi sampai dengan saat ini terdapat sejumlah 2.823 KK atau 12.689 jiwa yang berlokasi di Labangka I - V, Tolo Oi, Prode SP I - III, Sampar Goal SP I - II, Buin Batu dan Brang Lamar.

2.9. Kebudayaan

Pembangunan budaya dilakukan dalam rangka melestarikan dan mengembangkan seni budaya daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah ditengah semakin derasnya arus informasi dan kebudayaan global, untuk pemantapkan identitas bangsa dan daerah, serta meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang ditujukan untuk memperkuat kepribadian, memperkokoh rasa persatuan, mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan nasional serta memupuk nilai-nilai budaya dalam masyarakat.

Implementasi pembangunan kebudayaan di Kabupaten Sumbawa dilaksanakan melalui kegiatan pelestarian dan aktualisasi Adat Budaya Daerah yang diarahkan pada pembinaan terhadap sanggar seni yang hingga saat ini tercatat sebanyak 83 sanggar seni, bila dirata-ratakan dari tahun 2012-2016 dari 45 sanggar seni yang ada pada tahun 2011, maka terjadi penambahan sebanyak 38 sanggar seni selama lima tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan geliat berkesenian terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun di Kabupaten Sumbawa.

Event budaya yang rutin diselenggarakan setiap tahun seperti seperti Pekan Budaya Samawa, Festival Ponan, Festival Samba, Pertunjukan Seni dan Budaya Hari Kemerdekaan dan Hari Besar Nasional, Festival Kolaboratif Dewan Kesenian Sumbawa, dan Festival Samawa Malanti Budaya di Kecamatan Plampang serta Festival Moyo yang merupakan agenda tahunan yang semakin berkembang serta keikutsertaan Kabupaten Sumbawa dalam Misi Kesenian ke Luar Daerah.

Untuk menunjang pelestarian kepurbakalaan telah dilaksanakan program pengelolaan kekayaan budaya yang dilaksanakan secara komprehensif oleh UPTD Museum Daerah sebagai leading sektor, sasaran program ini yaitu penguatan kelembagaan pengelolaan kekayaan budaya daerah untuk merumuskan dan menyusun kebijakan daerah terkait dengan kegiatan pengelolaan, pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya, sejarah dan kepurbakalaan, kesenian dan kepariwisataan

daerah, serta sosialisasi dan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya lokal.

Keberadaan cagar Budaya di Kabupaten Sumbawa sampai dengan tahun 2016, berjumlah 42 buah, seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.10.
Jumlah Cagar Budaya di Kabupaten Sumbawa

No	Nama	Lokasi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Makam Sampar	Kel. Seketeng Kec. Sumbawa
2	Istana Dalam Loka	Kel. Seketeng Kec. Sumbawa
3	Istana Baru/Wisma Praja	Kel. Brang Bara Kec. Sumbawa
4	Bala Kuning	Kel. Seketeng Kec. Sumbawa
5	Batu Bertulis	Kel. Seketeng Kec. Sumbawa
6	Bala Datu Ranga	Kel. Pekat Kec. Sumbawa
7	Makam Karongkeng	Desa Karongkeng Kec. Tarano
8	Ai Renung	Desa Batu Tering Kec. Moyo Hulu
9	Lutuk Batu Peti	Desa Kuang Amo Kec. Moyo Hulu
10	Tarakin	Desa Kuang Amo Kec. Moyo Hulu
11	Raboran	Desa Sebasang Kec. Moyo Hulu
12	Makam Ponan	Desa Poto Kec. Moyo Hilir
13	Makam Lala Bunte	Desa Pemasar Kec. Maronge
14	Temang Dongan	Desa Pungkit Kec. Lopok
15	Batu Tata	Desa Punik Kec. Batu Lanteh
16	Batu Bergores	Desa Tepal Kec. Batu Lanteh
17	Patung Batu	Kec. Ropang
18	Kuber Tana Belo	Desa Olat Rawa Kec. Moyo Hilir
19	Batu Masjid	Desa Olat Rawa Kec. Moyo Hilir
20	Lakemudi	Desa Ngeru Kec. Moyo Hilir
21	Makam Lala Bulan	Desa Batu Bulan Kec. Moyo Hulu
22	Kuber Peti	Desa Poto Kec. Moyo Hilir
23	Batu Tempayan	Desa Mata Kec. Tarano
24	Keramat Endagu	Desa Lab. Jambu Kec. Tarano
25	Bala Dea Imam	Desa Empang Atas Kec. Empang
26	Batu Gong	Desa Pukat Kec. Utan
27	Makam Orong Bawa	Desa Orong Bawa Kec. Utan
28	Makam Faqih Ismail	Desa Motong Kec. Utan

No	Nama	Lokasi
1	2	3
29	Keramat Mampis	Desa Luar Kec. Alas
30	Lesung Batu	Desa Brangkolong Kec. Plampang
31	Batu Tapak Kaki	Desa Tangkan Pulit Kec. Moyo Hulu
32	Sampar Rhee	Dusun Kalimango Kec. Moyo Hulu
33	Makam Pua Bongan	Desa Labuhan Burung Kec. Buer
34	Liang Nemunri	Desa Dalam Kec. Alas
35	Makam Dea Busing	Kec. Lape
36	Batu Pemanto	Mate Mega Kec. Alas
37	Makam Datu Puti Geti	Kel. Brang Biji Kec. Sumbawa
38	Patung Kebo	Desa Jamu Kec. Lunyuk
39	Buin Ai Awak	Kel. Seketeng Kec. Sumbawa
40	Batu Nong	Desa Lekong Kec. Alas Barat
41	Makam Keramat	Labu Bua Kec. Utan
42	Bala Datu Alas	Desa Dalam Kec. Alas

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang program ini diantaranya fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya, pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuknaskah kuno, pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air, fasilitasi pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta.

2.10. Pemuda dan Olahraga

Dalam pembangunan pemuda dan olahraga ditengah keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah daerah senantiasa terus berupaya meningkatkan prestasi pemuda dengan melakukan pembenahan pada berbagai aspek, baik infrastruktur maupun suprastruktur. Selain itu, dilakukan pula fasilitasi dan dukungan terhadap organisasi induk olah raga beserta organisasi cabang olah raga, penyelenggaraan pertandingan olahraga antar sekolah, serta pertandingan olahraga antar klub serta antar kecamatan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan terkait kepemudaan dan olahraga pada tahun 2016 adalah dengan berperan sertanya pemuda dalam memanfaatkan peluang untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan, hal ini ditandai dengan berkembangnya

organisasi kepemudaan yang aktif sejumlah 19 buah organisasi dari 18 organisasi yang aktif pada tahun 2014 dengan prestasi-prestasi yang berhasil diraih diberbagai bidang seperti sebagai Duta Seni Wakil Indonesia Timur dalam rangka Literasi Sastra yang dilaksanakan di Frankfur Jerman dan Negara-negara sekitarnya atas nama Arifianto dan Abdul Hafid sebagai pemain sekeco, selanjutnya sebagai Duta Pertukaran Mahasiswa ke Norwegia dan sebagai peserta Jambore Internasional di Jepang. Prestasi lainnya berupa pemuda pelopor tingkat provinsi dengan prestasi dibidang pangan, bidang pendidikan dan bidang teknologi tepat guna.

Prestasi-prestasi yang telah diraih tersebut diharapkan dapat menjadi pendorong bagi pemuda-pemuda lainnya dalam meraih prestasi berikutnya, sehingga dengan lahirnya pemuda-pemuda berprestasi tersebut dapat meminimalisir lingkungan yang tidak sehat menjadi lingkungan yang sehat.

Dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga masyarakat, keberadaan sarana dan prasarana olahraga sangat menentukan pengembangan kemampuan prestasi pemuda dibidang olah raga. Oleh karena itu Pemerintah Daerah terus berupaya meningkatkan prasarana dibidang olahraga yakni dengan keberadaan klub olahraga yang hingga saat ini berjumlah 906 klub dari 896 klub pada tahun 2014 atau bertambah sebesar 11 klub.

Untuk jumlah lapangan olah raga tidak terjadi penambahan dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 298 buah. Terkait dukungan prasana keolahragaan ini, Pemerintah Daerah juga terus berupaya melaksanakan pembinaan-pembinaan dalam rangka meningkatkan minat generasi muda akan intensitas olahraga melalui pelaksanaan even-even olahraga yang rutin diselenggarakan setiap tahunnya. Optimasi organisasi cabang-cabang olahraga di Kabupaten Sumbawa relatif sudah mencapai ke tingkat desa.

2.11. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dan Sat.Pol-PP

1. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Penyelenggaraan urusan wajib kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang telah dilaksanakan diantaranya dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat, Pengukuhan pengurus

FKDM diseluruh Kecamatan, Melakukan koordinasi melalui kegiatan MUSPIDA dan KOMINDA dalam rangka pengendalian, memelihara ketentraman dan ketertiban dikalangan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan dari gangguan keamanan, memegang peranan penting terciptanya stabilisasi daerah. Kabupaten Sumbawa relatif terkendali dalam hal situasi keamanan, ini terlihat dari intensitas dan kualitas kejahatan yang tidak begitu menonjol. Adapun kegiatan yang diharapkan dapat berimplikasi pada partisipasi masyarakat, diantaranya kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat, penyuluhan pencegahan peredaran minuman keras dan narkoba, penyuluhan pencegahan praktek perjudian.

Keberadaan pos siskamling mengindikasikan bahwa partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam menyediakan fasilitas penunjang dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat. Disamping itu telah dilaksanakan pertemuan dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) pada seluruh kecamatan dalam rangka pembinaan dan pembekalan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap hal-hal yang akan terjadi guna menjaga kondusifitas keamanan daerah.

Selain itu ketersediaan pos siskamling pada setiap desa/kelurahan terdata sebanyak 1.837 pos siskamling, sehingga pada setiap desa/kelurahan memiliki rasio pos siskamling sebanyak 11 unit.

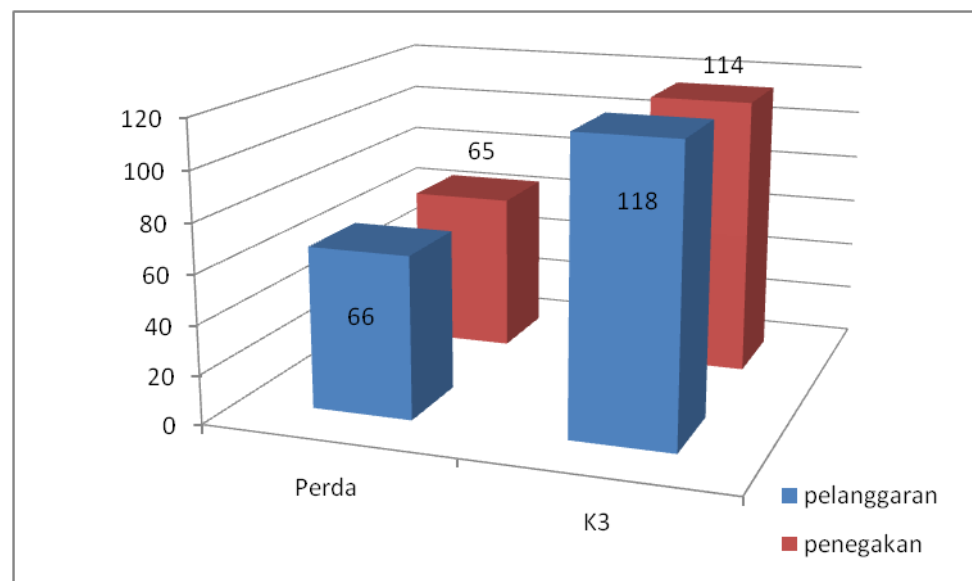
Keragaman umat beragama di Kabupaten Sumbawa membawa berbagai macam konsekuensi baik positif maupun negatif untuk menghindari terjadinya hal-hal yang negatif perlu ditingkatkan sikap toleransi dan kerukunan hidup antar umat beragama dalam masyarakat, selain itu pemerintah juga melaksanakan pembinaan terhadap organisasi keagamaan. Selain keragaman umat beragama di lingkungan masyarakat juga terjadi keragaman sosial, hal ini perlu disikapi dengan meningkatkan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat sehingga dapat terwujud percepatan proses asimilasi di kalangan masyarakat.

2. SAT.POL-PP

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum khususnya dalam hal penegakan peraturan daerah. Sesuai dengan tugas dan fungsinya maka sarana dan prasarana yang mendukung perlu menjadi perhatian pemerintah daerah terutama dalam hal pelaksanaan program unggulan yaitu program pemeliharaan ketertiban dan pencegahan penyakit masyarakat.

Berbagai upaya peningkatan terhadap kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja sebagai institusi pengamanan dan penegakan Peraturan Daerah terus dilaksanakan, hal ini dipandang penting sebagai jaminan tegaknya implementasi peraturan daerah. Adapun langkah-langkah antisipatif yang telah dilaksanakan untuk penegakan Perda, Keputusan Bupati dan aturan lainnya adalah berupa konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait, operasi gabungan terpadu, pelatihan dan pembinaan, serta sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat.

Terkait dengan kasus pelanggaran Perda yang terjadi sampai bulan Oktober 2016 dengan jumlah penyelesaian kasus sebanyak 65 kasus dari 66 pelanggaran PERDA dan 114 dari 118 kasus terkait K3 atau secara keseluruhan mencapai 97,2% sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut :



Gambar 2.11. Kejadian dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran PERDA dan K3 di Kabupaten Sumbawa

Untuk personil Satuan Polisi Pamong Praja dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi penambahan, sampai dengan tahun 2016 jumlah personil berjumlah 151 dari 121 pada tahun 2012.

Keterbatasan jumlah personil yang dimiliki oleh Satpol PP tersebut, tidak mengurangi kinerja yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2016, diantaranya:

- 1). Melaksanakan tugas Tim terpadu di bidang perizinan dalam memberikan pertimbangan teknis yang digunakan sebagai standar pokok penertiban perizinan;
- 2). Menjamin keamanan terhadap Pejabat Daerah/Negara dan tempat-tempat vital di wilayah Kabupaten Sumbawa dengan menempatkan personil/petugas piket serta melakukan mobilisasi personil dalam rangka pengamanan pada kegiatan-kegiatan tertentu untuk mengantisipasi gangguan keamanan serta menjaga kelangsungan terselenggaranya kegiatan terkendali;
- 3). Melakukan upaya deteksi dini dan pemetaan daerah-daerah rawan terhadap kemungkinan timbulnya upaya/gerakan kelompok-kelompok tertentu yang terindikasi melakukan tindakan anarkis ataupun preasure dan gejala-gejala lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Selain itu, keberadaan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

2.12. Pemerintahan Umum

Dalam urusan pemerintahan umum terdapat beberapa SKPD yang terlibat dalam urusan ini antara lain dilaksanakan oleh SKPD Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

1. Sekretariat Daerah

Sebagai wujud dari pelaksanaan reformasi birokrasi yang menuntut lahir dan terlaksananya proses pemerintahan yang efektif, maka perlu penataan perundang-undangan sebagai kelengkapan perangkat aturan, baik berupa peraturan daerah ataupun peraturan kepala daerah sebagai acuan pelaksanaan urusan pemerintah daerah.

Pada tahun 2016 tercatat jumlah perda yang telah ditetapkan sebanyak 15 buah dan Peraturan Bupati sebanyak 84 buah.

Untuk terlaksananya urusan pemerintah daerah ditempuh melalui program peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan berupa penataan organisasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa, dalam rangka membentuk organisasi pemerintah daerah lebih efektif dan dapat menjawab tuntutan pelayanan pada masyarakat, melalui beberapa regulasi yang diterbitkan untuk mewujudkan penataan organisasi, juga dilaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan public.

Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu kabupaten sebagai pilot project reformasi birokrasi di daerah yang ditetapkan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sejak tahun 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa telah menyusun Road Map reformasi birokrasi. Kondisi ini menggambarkan bahwa Kegiatan Penyusunan Strategi Manajemen perubahan dalam reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Sesuai dengan fungsi manajemen pemerintahan, maka kebijakan pembangunan yang sebelumnya telah disepakati secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Sumbawa sebagaimana dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan mengenai Kebijakan Umum, maka fungsi pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan telah dilaksanakan pengendalian penyelenggaraan kebijakan pembangunan dengan melakukan pemantauan terhadap capaian program/kegiatan pembangunan yang dijalankan oleh SKPD.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan aksesibilitas informasi bagi masyarakat, telah dilakukan pelayanan fasilitasi pemanfaatan teknologi komunikasi dan kehumasan, yang ditujukan dalam rangka berfungsinya arus komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat sehingga terjaminnya responsibiliti antara kebijakan pemerintah daerah dan kepentingan masyarakat.

2. SEKRETARIAT DPRD

Tingginya dinamika aktifitas DPRD dalam mengimplementasikan Tri Fungsi DPRD baik dalam kegiatan persidangan DPRD, konsultasi dan kunjungan kerja komisi dan alat kelengkapan DPRD lainnya, diperlukan sistem pendampingan sekretariat DPRD yang berkualitas, yakni mampu memfasilitasi secara administratif dan operasional seluruh rangkaian kegiatan DPRD. Sebagai wujud pelaksanaan fungsi pelayanan tersebut pada tahun 2016 di antaranya adalah pelayanan dalam kegiatan rapat pembahasan Perda APBD sebanyak 26 kali, melakukan Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintahan daerah dan tokoh masyarakat / tokoh agama sebanyak 15 kali, rapat-rapat alat kelengkapan dewan sebanyak 120 kali, pelaksanaan rapat-rapat paripurna sebanyak 43 kali, serta reses sebanyak 3 kali.

Adapun permasalahan yang sering dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa, diantaranya sering berubahnya jadwal kegiatan yang telah ditetapkan sebagai agenda kerja DPRD pada setiap masa sidang. Disamping itu keterbatasan waktu yang tersedia dalam memfasilitasi kegiatan-kegiatan insidental Dewan yang tidak terjadwal, akibat semakin banyaknya tuntutan penyampaian aspirasi masyarakat untuk melakukan hearing/dengar pendapat terhadap permasalahan yang ada, baik dalam dinamika pelanggaran tugas-tugas pemerintahan dan kemasyarakatan.

3. INSPEKTORAT

Untuk menjamin berjalannya sistem pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan maka dibutuhkan pengawasan yang intensif, Inspektorat Kabupaten Sumbawa melaksanakan fungsi pengawasan di daerah. Sasaran yang ingin dicapai diantaranya adalah menurunkan tingkat pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan di SKPD, yang dilaksanakan melalui program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah, yakni dengan melaksanakan pengawasan internal secara berkala, penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah, inventarisasi temuan pengawasan, tindak lanjut hasil temuan pengawasan, koordinasi pengawasan yang

lebih komprehensif dan melakukan evaluasi berkala terhadap temuan hasil pengawasan.

Pelaksanaan beberapa kegiatan Inspektorat Kabupaten Sumbawa tidak hanya dilaksanakan oleh Inspektorat, akan tetapi terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan dengan Lembaga Pengawasan lain seperti BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), yang didasarkan pada penandatanganan MOU (Memorandum Of Understanding) dengan BPKP Perwakilan Provinsi Bali Denpasar pada tahun 2002.

Selain itu untuk mendukung ketercapaian sasaran pengawasan dan pengendalian kebijakan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi penyusunan evaluasi kebijakan, pendataan ketersediaan objek IPPT, koordinasi evaluasi dan monitoring pelaksanaan pemerintahan, fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan.

4. BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (BKPP)

Pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sumbawa, pencapaian target-target kinerja dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya juga memiliki beberapa kebijakan, antara lain langkah strategis dan politis yang diperlukan mendukung strategi, yang harus sejalan dengan kebijakan daerah sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebijakan yang berkaitan dengan kepegawaian yang akan ditempuh antara lain; Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; Peningkatan disiplin; Pengembangan aparatur; Penerapan SOP (Standar Oprasional Prosedur) dan Penggunaan system informasi manajemen pegawai serta Pemberian penghargaan.

Dalam birokrasi Pemerintahan, dikenal jabatan karier yaitu jabatan dalam lingkungan birokrasi yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2016 mengalami penurunan sejumlah 20 orang dibandingkan tahun sebelumnya, dan sejumlah 152 apabila dibandingkan dengan tahun 2012. Sebagai gambaran kondisi PNS Kabupaten Sumbawa pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

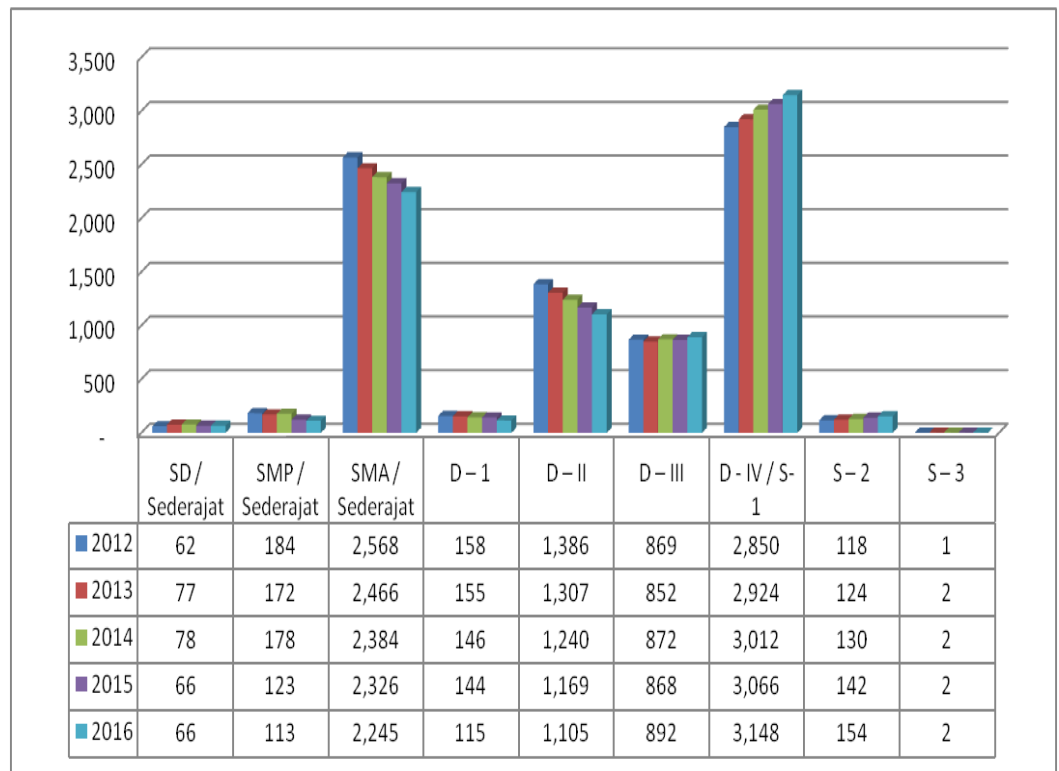
Tabel 2.11.
Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Rincian Golongan dan Eselon Di Kabupaten Sumbawa

No	Golongan	Pria	Wanita	Jumlah PNS
1	I	88	2	90
2	II	1,234	763	1,997
3	III	1,973	2,027	4,000
4	IV	1,224	865	2,089
Jumlah		4,519	3,657	8,176
Tahun 2015		4,610	3,718	8,328
Tahun 2014		4,451	3,389	7,840
Tahun 2013		4,587	3,455	8,042
Tahun 2012		4,704	3,492	8,196
No	Eselon	Pria	Wanita	Jumlah PNS
1	I	-	-	-
2	II	31	1	32
3	III	161	21	182
4	IV	471	220	691
Jumlah Pejabat Struktural		663	242	905
Tahun 2015		683	246	929
Tahun 2014		670	242	912
Tahun 2013		668	241	909
Tahun 2012		669	230	899
Jumlah Pejabat Fungsional		3,856	3,415	7,271
Tahun 2015		3,927	3,472	7,399
Tahun 2014		2,297	2,471	4,768
Tahun 2013		3,919	3,214	7,133
Tahun 2012		4,035	3,262	7,297

Berdasarkan proporsinya, Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2016 masih didominasi oleh golongan III diikuti oleh golongan IV kemudian golongan II, Berdasarkan eselon PNS, lebih didominasi oleh Eselon IV, diikuti oleh eselon III, dan eselon II sesuai dengan postur jabatan struktur yang tersedia.

Untuk tingkat pendidikan PNS masih didominasi oleh PNS yang berpendidikan Diploma IV / Strata I, diikuti oleh PNS yang berpendidikan SMA / sederajat, D-II, dan D-III. Sementara untuk PNS yang berpendidikan S-2 dan S-3 proporsinya masih sangat rendah, adapun gambarannya seperti pada tabel dan gambar berikut :

**Gambar 2.12. PNS Daerah Kabupaten Sumbawa
Berdasarkan Pendidikan**



2.13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sasaran yang ingin dicapai pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Sumbawa di antaranya adalah pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa, sehingga keberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan daerah ini bukan hanya sekedar berpartisipasi dalam perencanaan saja, melainkan juga secara kelembagaan, karena masalah aktual pembangunan dewasa ini tidak terlepas dari persoalan ekonomi baik nasional maupun daerah serta kapasitas aparatur pemerintahan desa. Dengan demikian, maka penanganan kelembagaan ekonomi dan pembinaan aparatur dipandang perlu untuk menjadi perhatian.

Dalam rangka terlaksananya pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa dan Kecamatan secara partisipatif, maka pada awal tahun 2016 telah dilaksanakan Musrenbang Desa dan

Musrenbang Kecamatan. Pelaksanaan musrenbang dilakukan secara berjenjang mulai dari pemerintahan desa/kelurahan, kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

Adapun Musrenbang tingkat Kecamatan dimaksudkan untuk membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan, membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan, melakukan klasifikasi atas kegiatan prioritas pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi SKPD Kabupaten. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan mulai dari desa hingga kabupaten sepanjang tahun 2016 sudah dipandang cukup baik, ditandai dengan kelancaran pelaksanaan musrenbang pada 165 desa/kelurahan.

Kegiatan lainnya yang telah dilaksanakan seperti pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan antara lain berupa fasilitasi Pokjanal Posyandu dengan Tim yang terdiri dari SKPD terkait sesuai peran dan fungsinya seperti Bappeda, Dinas Kesehatan, BKBPP, TP-PKK, Dinas Sosial, Kantor Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Nasional, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta Kantor Ketahanan.

Pokjanal Posyandu yang diberdayakan adalah meliputi pokjanal posyandu seluruh desa se-Kabupaten Sumbawa sebanyak 157 desa, Pokjanal Kelurahan sebanyak 8 kelurahan, Pokjanal Kecamatan sebanyak 24 kecamatan serta ditambah Pokjanal dari Kabupaten Sumbawa sebanyak 1 pokjanal.

Kelompok binaan LPM di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2016 sebanyak 24 kelompok dan jumlah kelompok binaan sebanyak 24 pada tahun 2016 terjadi penurunan di bandingkan dari tahun sebelumnya. Untuk keberhasilan yang dicapai BPM-PD Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 berhasil melaksanakan Pilkades di 20 Desa dan Pelantikan serempak 20 Kepala Desa dan juara I pada gelar TTG Tk. Provinsi yang dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa Barat.

BAB 3

Penutup

Buku " Data Base " Data dan Fakta Pembangunan Bidang Sosial Budaya Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 dimaksudkan untuk dijadikan sebagai arah dan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya di Kabupaten Sumbawa sekaligus dijadikan patokan target pencapaian visi dan misi Kabupaten Sumbawa.

Visi dan misi Kabupaten Sumbawa tidak hanya menjadi bagian tanggung jawab sebagian pihak saja. Pembangunan Bidang Sosial Budaya hanya menjadi salah satu unsur dalam rangkaian komponen pendukung untuk tercapainya visi dan misi tersebut, untuk mencapai tujuan yang diharapkan semua bidang dalam pembangunan daerah ini harus bersinergi secara optimal melalui perencanaan serta pelaksanaan program-program pembangunan di Kabupaten Sumbawa.

Pembangunan bidang sosial budaya merupakan hal yang tidak mudah, karena terkait dengan persoalan filsafat hidup bangsa, pandangan hidup masyarakat, persepsi, cara berfikir, sistem nilai dan orientasi pada masyarakat. Sasaran dari pembangunan bidang sosial budaya adalah membangun negara bangsa sehingga menjadi negara modern tanpa kehilangan jati dirinya.

Dengan kumpulan masyarakat yang berbagai latar belakang tentunya akan menghasilkan permasalahan yang beragam pula. Akan tetapi keberagaman tersebut itu juga yang dapat menjadi potensi yang luar biasa sebagai modal dalam mencapai keberhasilan pembangunan. Masyarakat kabupaten sumbawa diharapkan melalui pelaksanaan tugas pemerintah dalam berbagai hal baik fungsi pemerintahan, pelayanan maupun pembangunan diharapkan mampu menciptakan masyarakat sumbawa yang berdaya saing dalam berbagai sektor kehidupan, mulai dari sektor perekonomian, pendidikan, kesejahteraan, kesehatan dan lain sebagainya sehingga akan dapat mensejajarkan diri dengan masyarakat lain di daerah lain.

Pada sektor pendidikan yang memiliki korelasi kuat terhadap sektor pembangunan lainnya. Diharapkan adanya peningkatan tingkat pendidikan yang lebih tinggi yang dapat dienyam oleh masyarakat sehingga diharapkan tidak hanya dapat menaikkan IPM Kabupaten Sumbawa tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Pelaksanaan program belajar dan mengajar dengan inovasi baru perlu diterapkan, hal ini dilakukan karena cara dan sistem pengajaran lama tidak dapat diterapkan lagi. Perlu dilakukan perubahan yang lebih mengarah pada kurikulum berbasis kompetensi, serta lebih adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat pada saat ini melalui peningkatan kualitas pendidik dalam usaha peningkatan mutu pendidikan.

Pendidikan bisa diperoleh melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal, baik dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi berupa negeri maupun swasta, sedangkan pendidikan non formal meliputi berbagai kursus atau pelatihan keterampilan seperti mekanik, otomotif, listrik bangunan, kerajinan dan tata niaga.

Penyelenggaraan pendidikan tidak terlepas dari penyediaan sarana dan prasarana pendidikan berupa bangunan fisik sekolah. Jumlah unit sekolah berdasarkan tingkat pendidikan. Keadaan lembaga pendidikan, siswa dan guru pada setiap tingkatan pendidikan di Kabupaten Sumbawa menjadi indikator tentang kondisi umum infrastruktur pendidikan untuk aksesibilitas pendidikan di Kabupaten Sumbawa. Hal ini setidaknya dapat dilihat dengan memperhatikan indikator-indikator seperti rasio siswa per ruangan, rasio siswa per sekolah, rasio siswa per guru, rasio guru per siswa. Indikator ini menjadi ukuran daya tampung dan efektivitas proses belajar-mengajar.

Pada Sektor kesehatan, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya tidak hanya diupayakan oleh jajaran aparatur atau tenaga kesehatan saja, melainkan sangat ditunjang oleh adanya peran aktif masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan, sangat mendukung tercapainya tujuan pembangunan. Pemberdayaan masyarakat bertujuan agar masyarakat menjadi objek dan sebagai

subjek pembangunan kesehatan. Upaya-upaya sosialisasi masalah-masalah dan upaya pembangunan kesehatan kepada sektor lain dan masyarakat termasuk swasta perlu dilakukan secara intensif dan berkesinambungan, sehingga diperoleh sinergisme dalam upaya pembangunan kesehatan di daerah.

Dalam proses pengelolaan dan pendataan arsip-arsip bagian urusan kearsipan telah melakukan proses pengelolaan arsip secara maksimal, meskipun target yang dicapai belum maksimal hal itu dikarena jumlah tenaga kearsipan yang tersedia tidak sesuai dengan jumlah arsip yang tidak sedikit dan memerlukan proses yang sangat panjang, rumit dan harus dengan penuh ketelitian khusus dalam pengurusannya.

Ketersediaan perpustakaan yang tersebar di Kabupaten Sumbawa dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan hal tersebut terlihat dengan bertambahnya jumlah perpustakaan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Meningkatnya jumlah perpustakaan juga dibarengi dengan meningkatnya minat baca masyarakat hal itu ditandai dengan meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan umum dan juga perpustakaan keliling.

Untuk urusan kependudukan Perkembangan populasi penduduk di suatu daerah akan memberikan gambaran tentang bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk yang mendiami daerah itu terhadap tahun sebelumnya. Populasi penduduk akan bertambah bila jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari daerah lain lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk ke daerah lainnya.

Indikator untuk menggambarkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Sumbawa, diantaranya adalah mengenai kepemilikan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Nikah yang telah dikeluarkan. Selain KTP, ketertiban administrasi kependudukan juga dapat dilihat dari akta kependudukan yang telah dikeluarkan dan dimiliki oleh penduduk di Kabupaten Sumbawa. Data tersebut menunjukkan bahwa tertib administrasi kependudukan belum berjalan secara optimal di Kabupaten Sumbawa. Akta yang lebih dominan dikeluarkan hanya berupa Akta Kelahiran, hal itupun proporsinya masih belum 100 %. Sementara akta-akta lainnya belum dapat berlangsung secara baik. Hal tersebut

dapat terjadi karena masyarakat tidak melaporkan tentang perkawinan, kematian, maupun perceraian yang terjadi.

Pembangunan keluarga ditujukan untuk meningkatkan derajat kualitas individu melalui pendekatan berbasis keluarga. Pendekatan pembangunannya adalah meningkatkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera menuju terwujudnya nilai luhur budaya bangsa guna meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga sehingga mampu mendukung kegiatan pembangunan.

Pendekatan ini berupaya menggeser peran penduduk dalam pembangunan dari semula sebatas obyek menjadi subyek pembangunan. Dengan konsep tersebut maka kualitas penduduk akan menentukan seberapa besar proporsi penduduk yang tetap hanya sebatas obyek dan seberapa besar yang dapat berperan aktif sebagai subyek pembangunan. Dalam rangka mendukung tujuan tersebut maka upaya yang dilakukan secara generik adalah melakukan perencanaan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dan pada saat bersamaan meningkatkan derajat pendidikan dan kesehatan sehingga secara simultan akan mengurangi beban tanggungan jiwa dan pada saat bersamaan produktifitas penduduk dapat meningkat. Untuk menekan pertumbuhan penduduk, keikutsertaan Pasangan Usia Subur dalam program Keluarga Berencana menjadi salah satu tolok ukur pembangunan daerah dan nasional.

Jumlah dan sebaran penduduk merupakan salah satu variabel dalam pengambilan keputusan investasi publik. Secara umum dapat dikatakan bahwa penduduk berjumlah sedikit dan tersebar pada satuan wilayah geografis yang luas akan membutuhkan biaya investasi per satuan yang lebih tinggi dibanding wilayah berpenduduk banyak dan tidak tersebar terlalu jauh. Informasi jumlah dan sebaran akan memberi dampak yang berbeda dalam proses pengambilan keputusan pembangunan wilayah secara luas.

Dalam sektor pembangunan sosial penanganan sekaligus pemberdayaan fakir miskin juga merupakan upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam mengurangi jumlah penyakit-penyakit sosial ditengah masyarakat. Termasuk juga pemberdayaan masyarakat atau komunitas adat terpencil.

Pemberdayaan tersebut dilaksanakan melalui pemberian pelatihan keterampilan untuk usaha ekonomi, pemberian pelatihan keterampilan bagi khusus penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan, karena tingginya jumlah angkatan kerja di suatu daerah harusnya menjadi modal dasar untuk menggeliatkan perekonomian daerah. Bila terjadi sebaliknya maka berpeluang besar untuk menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial. Indikator ketenagakerjaan yang sering digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja berbanding dengan penduduk usia kerja atau disebut Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

Kebijakan dan program transmigrasi dilaksanakan dalam kerangka memenuhi kebutuhan sumberdaya manusia yang diperlukan untuk mengembangkan potensi sumberdaya yang tersedia. Melalui model Kerjasama Antar Daerah paradigma baru pembangunan transmigrasi di era Otonomi Daerah diharapkan merupakan penyempurnaan dari konsep penyelenggaraan transmigrasi sebelumnya. Penyelenggaranya tetap berada ditangan Pemerintah, dengan mulai mengundang unsur-unsur swasta dan menata model penyelenggaraan transmigrasi melalui pola kerjasama antar daerah, yaitu Provinsi / Kabupaten / Kota pengirim transmigran dengan Provinsi / Kabupaten / Kota penerima / penempatan transmigran.

Peningkatan Sumberdaya manusia dalam hal ini aparatur pemerintahan mutlak dilakukan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintah dalam setiap fungsinya. Selain aparatur, penyediaan sarana dan prasarana penunjang juga menjadi hal wajib. Kaitan dengan peningkatan kapasitas aparatur, BKPP Kabupaten Sumbawa telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain mensosialisasikan peraturan perundang-undangan terkait masalah aparatur, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terhadap masing-masing kualifikasi pekerjaan. Program yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan aparatur dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kualitas melalui pengiriman PNS Tugas belajar, baik Diploma, Strata 1, Strata 2 bahkan Strata 3. Sedangkan bagi Aparatur yang akan menempati eselon tertentu juga di

bekali dengan diikutsertakan dalam DiklatPim baik tingkat II, III dan IV.

Berbagai hasil dan permasalahan selama tahun 2016 yang telah dituangkan dalam Buku Data Base Data dan Fakta Pembangunan Bidang Sosial Budaya Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 ini diharapkan dapat untuk mengarahkan perbaikan-perbaikan ke depan. Keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah patut disyukuri, mengingat bahwa pencapaiannya diraih dengan cara yang tidak mudah. Sangat disadari, bahwa masih terdapat permasalahan-permasalahan yang harus segera diatasi dan dibenahi bersama.

Dengan terciptanya masyarakat sumbawa dalam kondisi ideal tentunya akan dapat pula menjadikan kabupaten sumbawa dalam situasi yang ideal pula. Peningkatan pelayanan dasar, peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengembangan potensi dengan tetap memperhatikan lingkungan hidup dan kearifan lokal akan terwujud.

Sejalan dengan hal tersebut maka konsistensi SKPD dalam merumuskan rencana strategis dan rencana kerja tahunan merupakan hal mutlak yang diperlukan dalam rangka pemenuhan tujuan jangka panjang pembangunan di daerah kita. Pelaksanaan pembangunan bidang sosial budaya ini sebagaimana bidang-bidang lain harus dibarengi pula oleh pembangunan serta penciptaan ide-ide serta kreatifitas para pelaku pembangunan.